



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI VI DPR RI
RAPAT KERJA DENGAN
MENTERI KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2024 – 2025
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 10 (Sepuluh)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 4 September 2024
Waktu : Pukul 14.58 s.d. 17.08 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Gedung Nusantara I DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : Mohamad Hekal, M.B.A.
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P.Gerindra)
- Acara : Pembahasan mengenai :
1. Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025 (Pagu Anggaran);
2. Pembahasan Realisasi Anggaran s.d Triwulan II TA 2024; dan
3. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Aji Nurhadi Wibowo, S.E., M.A.P
(Kepala Sub Bagian Rapat Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
21 dari 54 orang Anggota, dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (F- PDIP)**

5 dari 12 orang Anggota

1. Adisatrya Suryo Sulisto
2. Rieke Diah Pitaloka
3. Sonny T. Danaparamita, S.H.
4. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
5. Dr. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

(F-PG)

4 dari 8 orang Anggota

1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
2. Doni Akbar, S.E., M.M.
3. Trifena M. Tinal, B.Sc.
4. Drs. H. Dadang S. Muchtar

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P.GERINDRA)

2 dari 7 orang Anggota

1. Mohamad Hekal, M.B.A.
2. Ir. H. La Tinro La Tunrung

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P.NASDEM)

2 dari 6 orang Anggota

1. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
2. H. Subardi, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

1 dari 6 orang Anggota

1. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si.
2. Muslim, S.HI., M.M.
3. Hj. Melani Leimena Suharli

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

2 dari 4 orang Anggota

1. Amin Ak, M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

2 dari 4 orang Anggota

1. Dr. H. Jon Erizal, S.E., M.B.A.
2. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota

-

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Menteri Koperasi & UKM Republik Indonesia (Drs. Teten Masduki) beserta jajarannya

2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.) beserta jajarannya

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, bisa kita mulai ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Anggota Komisi VI DPR RI, dan Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Koperasi dan UKM RI, Bapak Teten Masduki berserta jajarannya, Menteri Perdagangan RI, Bapak Zulkifli Hasan, beserta jajarannya,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Taala*, kita dapat melaksanakan rapat kerja pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Dan menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI, rapat kerja pada hari ini ditandatangani oleh 13 orang, izin 14, sudah mewakili 7 fraksi. Dengan demikian, kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Pasal 276 ayat (1), maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini, dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

Setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, terima kasih kepada Menteri Koperasi dan UKM RI, dan Menteri Perdagangan RI, atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini.

Sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat pada hari ini adalah:

1. Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025;
2. Pelaksanaan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024; dan
3. Lain-lain.

Untuk itu, kami minta persetujuan dari anggota, bahwa rapat kami akhiri pada pukul 17.00, ya.

Setuju, ya?



(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan,

Sebelum kita memulai acara hari ini, saya ingin memberitahukan ada berita dukacita. *Innalillahi wa inna ilaihi* rojiun, telah berpulang ke rahmatullah, sahabat, rekan kita di Komisi VI, yaitu Datuk Drs. H. Nyat Kadir, Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, pada hari Minggu, 1 September 2024 di Rumah Sakit Pondok Indah di Jakarta pada pukul 14.17 WIB. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dimaafkan dari segala salah dan khilafnya, dilapangkan dan diterangkan kuburnya. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan serta keikhlasan. Amin.

Al-Fatihah.

Amin.

Bapak-Ibu, dan hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025, bahwa Pagu Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2025 adalah sebesar Rp937.166.229.000,00. Nilai tersebut masih sesuai dengan Pagu Indikatif Kementerian Koperasi dan UKM RI yang telah dibahas pada rapat kerja tanggal 10 Juni 2024 yang lalu. Dalam rapat kerja tersebut, Komisi VI DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2025 sebesar Rp665.028.702.000,00, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas dan non-prioritas yang belum *terakomodir* pada Pagu Indikatif tahun 2025.

Sedangkan, berdasarkan Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025, bahwa Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.653.277.516.000,00. Jumlah nilai Pagu Anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar 0,34% jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif yang telah dibahas pada tanggal 13 Juni 2024, yakni sebesar Rp1.658.999.354.000,00. Jadi, ini turun kira-kira 5 miliar ini. Dalam rapat kerja tersebut, Komisi VI DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2025 sebesar 2,4 triliun, yang akan digunakan untuk mendorong program prioritas yang belum *terakomodir*.

Selain pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025, pada rapat kerja kali ini kita juga ingin mengetahui Realisasi Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Perdagangan RI sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, khususnya seberapa besar penyerapan anggaran dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kementerian. Untuk itu, kami langsung *aja*, kita persilakan kepada Bapak Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM.

Silakan, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):



Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Budhaya,
Salam kebajikan,

Yang saya hormati, rekan kerja kami, Pak Zulhas, Pak Menteri Perdagangan, Pak Wamendag, dan juga jajaran, Pimpinan, dan Para Anggota Komisi VI DPR RI,

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan turut berdukacita yang dalam atas berpulangnya Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Nasdem, almarhum H. Nyat Kadir. Semoga almarhum diterima amal kebbaikannya oleh Allah *Subhanahu wa Taala*.

Selanjutnya kami ingin menyampaikan, sebagaimana Surat Bersama Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran Tahun 2025. Kementerian Koperasi ditetapkan sekitar Rp937.166.229.000,00. Pagu Anggaran itu mengalami penurunan sebesar 37,44% jika dibandingkan dengan Alokasi Anggaran Tahun 2024. Jadi *kan*, Pak Mendag, anggaran Kemenkop itu Eselon III di Mensos, *gitu*, atau di Kemensos atau di Kemen PUPR, begitu.

Lalu, besaran Pagu Anggaran tersebut terdiri dari program dukungan manajemen sebesar 380 miliar lebih *lah, enggak usah sebutin*. Lalu, program kewirausahaan 548 miliar lebih.

Nah, berikutnya rancangan program Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2025 meliputi masing-masing satker:

1. Deputi Bidang Perkoperasian, dengan total 70,59 miliar;
2. Deputi Bidang Usaha Mikro, total 68,80 miliar;
3. Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah, dengan total anggaran 61,42 miliar; lalu
4. Deputi Bidang Kewirausahaan, 70,33 miliar;
5. Sekretariat, 317,65 miliar;
6. LPDB, 226 miliar; lalu
7. LLP, dengan total anggaran 55,5 miliar; dan
8. Dana dekonsentrasi, dengan total anggaran sebesar 63,81 miliar;
9. Dekopin, anggarannya 3 miliar.

Lalu, kami sampaikan juga realisasi anggaran tahun 2024 triwulan II. Realisasi per September ini mencapai 51,14 miliar. Ini memang kelihatan kecil karena masih ada beberapa pelaksanaan yang memang akan diselesaikan pada bulan November dan Desember.



Kendala dalam pelaksanaan anggaran triwulan II, maaf, saya sampaikan, bahwa pada realisasi target kita pada triwulan III, 30 September 2024, 53,46%. Lalu, hingga akhir Desember kita memastikan bisa 97,11% penyerapannya.

Lalu, di sini juga kami akan sampaikan kendala dalam pelaksanaan anggaran triwulan II, di antaranya,

1. Kegiatan Rumah Produksi Bersama, Fasilitas Kemasan, Rumah Kemasan, Revitalisasi Pasar Rakyat saat ini masih dalam tahap pengadaan atau lelang; lalu
2. Pelaksanaan kegiatan pendataan lengkap. Saat ini proses pelaksanaan oleh enumerator di 4 provinsi; dan
3. Pembatalan RUU Perkoperasian yang belum dimulai.

Saya kemarin berdiskusi dengan Pak Menkumham yang baru, yang baru dipanggil oleh Pak Presiden. Beliau meminta ada prioritas ini, penyelesaian RUU Perkoperasian.

Oleh karena itu, upaya percepatan yang kami lakukan di antaranya:

1. Mengawal program/kegiatan prioritas dan terutama yang memiliki alokasi anggaran yang cukup besar;

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sebentar.

Izin, Pak. Maksudnya diselesaikan di masa periode ini? DPR-nya sekarang?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Begitu.

Jadi, yang disampaikan Pak Presiden kepada Pak Menkumham yang baru, minta diprioritaskan, diselesaikan. Nah, itu saya sudah berdiskusi apakah mungkin atau tidak. Kami akan baru *meeting* dengan Pak Menkumham.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

Mudah-mudahan, luar biasa itu, tinggal 3 minggu.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Iya.



2. Lalu, berikutnya kami juga ingin, apa, menginventarisasi kembali kegiatan-kegiatan yang ada untuk melaksanakan sesuai dengan *timeline* perencanaan yang telah disusun; lalu
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala.

Berikutnya, capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM hingga tahun 2024, di antaranya peningkatan skala usaha melalui hilirisasi produk, korporatisasi petani, transportasi, transformasi pembiayaan UMKM, di antaranya penyaluran KUM, KUR dengan skema rantai pasok, memfasilitasi pembiayaan sektor produktif koperasi melalui sinergi dengan LPDB, serta penyediaan alternatif pembiayaan.

Kami juga sedang terus-menerus mengusulkan inovasi *credit scoring* untuk penyaluran KUR, karena kalau tidak dilakukan perubahan, kecil sekali, apa, akses UMKM yang *unbankable* untuk ke perbankan, karena bank masih menggunakan data *credit history*. Sementara ada 30,76 juta UMKM yang belum terhubung ke bank yang *enggak punya credit history* ya, karena belum pernah *minjam* duit ke bank. Sehingga kami usulkan ada dana, data alternatif, yaitu data *Telco* sama data PLN. Dan ini sudah kami *exercise*, itu bisa meningkatkan jumlah UMKM yang *bankable*.

Nah, OJK juga sudah cukup baik merespons ini. Di OJK sekarang sedang menyiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan inovatif *credit scoring*, salah satunya sudah ada 17 perusahaan inovatif, inovasi *credit scoring* yang terdaftar, dan juga SLIK, data SLIK akan ditambahkan dengan data penerima *fintech* dan juga koperasi simpan pinjam. Nah, dengan data itu saja, saya kira sudah cukup luas.

Lalu, kami juga solusi nelayan untuk penyaluran solar subsidi, peningkatan rasio kewirausahaan, dan reformasi badan layanan umum.

Nah, lain-lain, kami mengidentifikasi permasalahan struktural dan usulan keberlanjutan program. Jadi, terdapat lima permasalahan struktural dalam pengembangan koperasi dan UMKM yang kami catat:

1. Minimnya kualitas SDM pelaku koperasi UMKM dan wirausaha, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang keberlanjutan usaha; lalu
2. Kelangkaan pasokan bahan baku dan ketidakstabilan harga;
3. Jumlah UMKM yang terjalin dalam kemitraan dan rantai nilai global masih sangat terbatas;
4. Kurangnya inovasi produk dan adaptasi teknologi digital, serta kualitas SDM pelaku korporasi dan UMKM yang didominasi oleh pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*); lalu
5. Jumlah UMKM yang dapat mengakses pembiayaan, tadi di perbankan itu masih rendah, ya, sekarang turun dari 21 jadi 19%, dan lembaga jasa keuangannya juga masih sangat terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun '92 tentang Perkoperasian kurang sesuai dengan perkembangan ekonomi, persaingan usaha,

dan teknologi, sehingga perlindungan kepada anggota koperasi sebagai badan hukum dan masyarakat serta pertumbuhan usaha koperasi kurang optimal.

Karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, setidaknya ada lima usulan keberlanjutan program dalam peningkatan produktivitas koperasi, UMKM, dan kewirausahaan, yaitu:

1. Peningkatan rasio kewirausahaan melalui pusat kewirausahaan (*Entrepreneur Hub*); lalu
2. Peningkatan skala usaha kecil melalui korporatisasi petani, nelayan berbasis koperasi, ya; lalu
3. Penguatan inovasi dan teknologi dalam skema rantai pasok industri melalui rumah produksi bersama yang dikelola koperasi; lalu
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM melalui standarisasi produk dan perluasan akses pasar;
5. Inovasi pembiayaan, meliputi KUR klaster, tadi penerapan inovasi *credit scoring*, pembiayaan sektor riil melalui LPDB, juga *venture capital*, dan juga *Score funding* (SCF), ya, *security crowd funding* untuk *PO financing*, terutama untuk pengadaan barang dan jasa di pemerintah; lalu
6. Penyempurnaan regulasi perkoperasian melalui pengesahan RUU Perkoperasian dan aturan pelaksanaan, pengembangan ekosistem usaha koperasi, dan pengawasan simpan pinjam, seperti LPS untuk koperasi dan lembaga pengawas simpan pinjam untuk koperasi.

Barangkali itu, Pak Ketua, yang ingin saya sampaikan. Kiranya penjelasan ini dapat diterima oleh para Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Santi, Santi, Santi Om,*

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, terima kasih.

Kita lanjut dengan Menteri Perdagangan. Dan kalau boleh, Pak, ini saya lupa mengucapkan selamat datang, Pak Wamen. Saya dengar, kalau *gak* salah, habis ada rotasi di kementerian Bapak. Mungkin boleh bisa dijelaskan, teman-teman Eselon I sekarang berkedudukannya di mana.

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Oh, baik.

Terima kasih.



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

**Pak Ketua, dan
Anggota DPR Komisi VI yang terhormat, Bapak-Ibu,
Pak Teten, sahabat saya, dan
seluruh dari Kementerian UKM yang saya hormati,**

Pak Wamen, ini memang rotasi, Pak, karena ada berapa kita, ya? Pensiun, ya? Delapan, Pak, pensiun, banyak jadinya. Pak Sekjen sekarang Pak Budi, Pak Moga di PDN, Pak Rusmin di PKTN, Pak Isy Karim di Daglu, Ibu Mardiana di PEN. Ada yang lain, staf, Pak Kasan di Bappebti, Ibu Punto Dewi di BK Perdag. Yang lainnya, staf ahli, terus Irjen baru Pak Lutfi, tapi sudah maju Gubernur di Jawa Tengah, jadi sudah mengajukan pengunduran diri. Nanti sudah ada Pak Putu, bakal penggantinya, tapi karena kita lagi tunggu Keppres dari Bapak Presiden, sementara dirangkap oleh Sekjen, PLT.

Wakil masih. Mudah-mudahan, mudah-mudahan panjang, *gitu*. Masih baik-baik sama Pak Ketua itu. Nasib tergantung Ketua sekarang, hati-hati.

Tentu kita semua berduka, Pak Nyat Kadir itu saya teman lama, tahun 2000. Beliau dulu Walikota Batam, wakilnya Asman Abnur dulu. Jadi, kami bersahabat.

**Pak Ketua, dan
Anggota yang terhormat,**

Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2024, saya singkat saja ya. Anggaran kita total Rp1.967.312.625.000,00, realisasi Rp1.128.092.241.408,00 (57,3%). Saya *gak* usah rinci karena masing-masing sudah punya bahannya.

Beberapa tantangan dalam realisasi anggaran Kementerian Perdagangan sehingga belum maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Dana tugas pembantuan, berupa pembangunan revitalisasi pasar rakyat 68 miliar, biasanya nanti di daerah, tahun-tahun ini biasanya bulan-bulan ini akan hampir selesai, Pak;
2. Ada juga kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya *disesuai* ke pihak ketiga, juga ini biasanya September, Oktober ini, tapi terakhir biasanya Desember itu Kemendag ini hampir 99%.

Rencana Kerja Kementerian Pangan tahun 2025. Saya tadi sedih, anggaran saya turun banyak, tapi ternyata Pak Teten lebih gawat lagi, ya, saya terhibur juga, ya. Kami kalau dari 2020, Pak Ketua, sampai ini turunnya separuh, karena 2020 3,3 triliun, sekarang tinggal 1,6. Ternyata, tadi Pak Teten bulan, tahun ini *aja* sudah 37% turunnya, *gitu*, lebih sedih. Jadi, saya

lebih gagah rasanya. Tadi saya sudah lemas, *gitu*, dengar Pak Teten, aduh lebih bagus saya kelihatannya.

Jadi, Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2025 per jenis belanja, 52 belanja barang, 53 belanja modal, 51 belanja pegawai. Pagu 2025 Rp1.653.277.516,00, turun 314 miliar atau hampir 16%, ya. Kalau Pak Teten tadi 37%, ya, saya lumayan, 16%, tetapi kalau dari 2020, ya, 50% kita ya, 50% turunnya.

Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2025, tadi per program, program dukung manajemen, program perdagangan dalam negeri, program perdagangan luar negeri, ada masing-masing sudah ada Pagunya di tabel sebelah kanan. Saya kira, saya tidak perlu bacakan lagi karena turunnya banyak, ya, *gak* perlu lagi sampaikan detail, Pak, karena kurangnya sudah banyak, *gitu*.

Saya kira demikian,

**Pak Ketua, dan
Seluruh Anggota Dewan yang saya hormati,**

Habis, ngomong apa lagi? Turunnya banyak. Yang mau saya bahas apalagi, *gitu*, *wong* turun, kalau naik banyak.

Terima kasih.

Selamat sore,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI
DPR RI):**

Walaikumsalam,

Tapi yang menarik, Pak, saya *gak* dengar para Bapak-Bapak ini masih mengusulkan tambahannya lagi.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Malu juga, Pak.

**KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI
DPR RI):**

Kalau menurut saya, Pak, kalau memang masih, *ini* kan memang untuk dikirim ke Bangar sekali lagi. Kalau usulan penambahan yang dulu diusulkan memang belum tercapai mau ditulis lagi, kita bisa tulis lagi. Siapa tahu ada mukjizat atau kita memang menunggu nanti.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):



Saya memang *anu*, Pak, mengajukan, tapi mudah-mudahan nanti sama Mas Eko, ya. Nanti *ngomong* sama Ketua dulu.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, iya.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Sudah, Pak.

Mudah-mudahan katanya ada harapan.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tapi harus ditulis nanti di kesimpulan kita, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Iya, baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Kemarin, kan, kita *nambah* berapa, ya? 500, Pak, sudah disetujui, Pak, sudah.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh, *oke*,

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Rencana tambahan 500, tapi ini lagi perjuangan, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, ya, kalau begitu nanti harus kita tulis itu di kesimpulan.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Tulis lagi, tulis lagi.

Baik, Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya.

Pak Eko, itu menentukan nasibnya periode depan Pak Eko juga itu.

Baik, ini teman-teman yang ingin pendalaman, kita mulai dari Pak Subardi.

Silakan, Pak.

F-P. NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan, dan
Segenap Anggota DPR RI Komisi VI,
Pak Menteri Perdagangan,
Pak Teten, Pak Menteri Koperasi dan UKM, dan
Seluruh jajaran yang hadir pada RDP pada sore hari ini,**

Saya mau membahas, membahas apa, ya? Soalnya, persoalan itu langsung konkret, satu-satu persoalan, kurang duit, kurang uang. Nah, oleh karena itu, saya telah membaca apa-apa yang telah disampaikan, paparan dari, memperhatikan dan membaca paparan dari Pak Menteri Perdagangan maupun Pak Menteri Koperasi dan UMKM.

Saya melihat konkret dari Pak Menteri Perdagangan, ya, langsung saja ini, bahwa mengajukan usulan senilai 500 miliar dengan tiga prioritas utama kegiatan, yaitu:

1. Penguatan perwakilan perdagangan untuk pemasaran produk Indonesia dan *market intelligence*; kemudian
2. Promosi peningkatan ekspor; integrasi informasi ekspor;
3. Penguatan kebijakan peningkatan ekspor.

Saya contohkan, penguatan perwakilan perdagangan, artinya untuk biaya yang ada di perwakilan luar negeri. Betul, ya, Pak, ya? Ketika itu anggaran tidak terpenuhi, apakah perwakilan kita disuruh pulang? Apakah perdagangan kita dengan luar negeri, macet ekspor-impornya, jadi macet?

Oleh karena itu, juga melihat juga anggaran dari tahun sebelumnya, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, *taroh lah* empat tahun, lima tahun. Relatif naik-turunnya tidak terlalu anomali, naik-turun, naik-turun, ya. Tetapi 2025 itu anomali, Pak, turunnya 50%. Nah, sehingga saya menyepakati, kami menyepakati, usulan ini menjadi prioritas.

Artinya, usulan tambahan ini menjadi prioritas, agar apa? Program kementerian, baik Perdagangan maupun Koperasi ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai karena anggaran, fungsi kementerian akan menurun, akan tidak terpenuhi. Yang rugi siapa? Rakyat. Apalagi ini sektor ekonomi. Nah, itu secara umum, ya, baik itu Koperasi maupun Perdagangan. Dari Perdagangan sudah konkret, pengajuannya jelas, ini jelas.

Nah, mohon Pak Teten, ini, Pak Teten, memang hanya memberikan program, *tapi* lebih konkret, Pak. Jadi, kalau tidak salah, Kementerian Koperasi itu membutuhkan tambahan agar sesuai dengan anggaran tahun kemarin, 2024, 2024, yaitu adalah 560 miliar, Pak. Sudah, ajukan *aja* itu, usul saya begitu. Agar apa? Ini saya bukan ingin, apa, memberikan respons kepada kementerian atau *membackup* kementerian, tapi demi masyarakat kita, demi rakyat kita. Yang harus diampu Pak Teten itu jutaan manusia, UMKM dan sebagainya. Nah, yang selama ini terfasilitasi, ketika ini dipotong sampai hampir 50%, apa daya mereka?

Nah, mohon Pak Teten, walaupun itu masih tinggal berapa bulan, siapa, besok juga tahu mau terus atau tidak, demi rakyat, demi bangsa, demi rakyat kami, rakyat kita semua ini, tolong bikin konkret pengajuan penambahan anggaran di 2025 ini yang sama dengan anggaran 2024. Mungkin itu saja.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Baik, ini Pak Muslim. Ini *kok* saya *enggak* lihat nama Bu Nevi di sini?

Eh sorry, Pak Herman, silakan.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Baik, terima kasih, Pak Haikal.

**Ketua, dan
Seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Menteri, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pak Zulkifli Hasan,
Pak Teten Masduki, Menteri Koperasi beserta seluruh jajaran,
baik Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Koperasi,**

Pertama, tentu kalau meminta persetujuan atas anggaran hari ini untuk segera didefinisikan, setuju. Namun lebih setuju jika memang ada penambahan anggaran. Ini *kan* dua kementerian yang menurut kami ini



adalah Kementerian yang strategis. Kementerian yang ini juga terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Kementerian Koperasi UMKM memiliki jumlah yang sangat besar, 65 juta UMKM yang bergerak di situ dan ini menjadi “jangkar” perekonomiannya masyarakat. Bahkan, kalau melihat eksistensi *survive*-nya kehidupan masyarakat, sebetulnya bergantung kepada Kementerian Koperasi UMKM, bergantung kepada usaha kecil dan menengah. Ini yang selalu menjadi keheranan.

Tentu, sudah 5 tahun duduk di sini, rasa-rasanya memang tidak pernah bergerak terlalu agresif, *gitu* ya. Kemajuan ada, kemajuan ada, peningkatan anggaran ada, tapi ya *kok* turun lagi hari ini. Kementerian Perdagangan dulu di awal sudah hampir 3 triliun, Pak, anggarannya, sekarang hampir 2 triliun, sekarang, bukan hampir 4 triliun. Dulu hampir 3 triliun, anggarannya, 2,7-2,8, tapi sekarang turun kembali. Artinya bahwa untuk hal yang menyangkut hajat hidup, semestinya ada *affirmative budget* yang ini mencukupi, meskipun mungkin tidak bisa memenuhi keseluruhannya dan momentumnya ada.

Menurut saya, Pak Zulkifli sebagai ketua partai, pendukung pemerintah ke depan, mungkin bisa dirumuskanlah di antara ketua-ketua partai merumuskan kembali terkait dengan *affirmative budget*, Pak. Mana *budget-budget* ataupun APBN yang ini bisa didorong lebih mementingkan kepada *affirmative action*, lebih mementingkan kepada kepentingan yang lebih memberikan daya dukung terhadap kehidupan rakyat.

Nah, kenapa penting? Ya koperasi tadi, bahwa hampir mayoritas masyarakat Indonesia bergantung di sektor UMKM. Hampir seluruh masyarakat sangat tergantung terhadap kestabilan harga di pasar. Nah, ini *kan* dua hal yang menurut saya dan mayoritas yang menjadi binaannya Pak Menteri Perdagangan juga adalah sebagai usaha kecil menengah juga. Hubungannya ada, korelasinya ada.

Nah, jadi kalau melihat anggaran seperti ini, kita tidak bisa menyalahkan karena bagaimanapun APBN terbatas, namun, menurut saya ruang fiskalnya masih ada, *gitu* ya. Kalau misalkan Kementerian UMKM atau Kementerian Koperasi dan UKM itu bisa anggarannya 5 triliun, Pak Teten prestasinya 5 tahun kelihatan, Pak, *gitu*.

Tapi kalau anggarannya *more and less* di angka 1 triliun seperti ini, ya menurut saya ya begini-begini *aja*, *gitu*, karena seperti yang tahun lalu, punya beban untuk bisa, apa namanya, mengalokasikan *budget* kepada pendataan misalkan, kepada sistem informasi. Nah, kalau terus begini, ya, UMKM-nya juga tidak bergerak.

Sahabat saya, kawan saya yang jualannya serabi, sehari omsetnya Rp200.000,00 sampai Rp300.000, ya seperti itu *aja* sampai sekarang, sudah bertahun-tahun. *Tapi*, kalau Pak Teten besar anggarannya, *kan* bisa mendorong anggaran stimulus kepada UMKM, sehingga mereka bisa naik kelas, *gitu*.

Bahkan, slogan UMKM naik kelas ini selalu kita dorong, selalu kita dukung, tetapi juga ya dengan cara apa? Bahkan, kalau saya kemarin banyak mengumpulkan para UMKM, sekarang karena 2020-2021 terjadi COVID, mereka sekarang terjerat, Pak, terjerat oleh apa? Oleh apa namanya itu? Hutang bank yang enggak terbayar itu, *gitu*. BI *Checking* namanya, BI *Checking*.

Nah, ini, Pak, mohon, coba ada solusilah ya. Karena setiap saya tanya, kalau saya tanya kepada mereka, mereka tidak bisa mengembangkan, karena untuk meminjam ke bank dengan status mereka masih ada tanggungan dan masuk dalam *negatif list* BI *Checking*, ini juga menjadi persoalan tersendiri. Mereka tidak bisa mengembangkan usahanya, padahal *kan* saat yang tepat sesungguhnya setelah terlepas dari COVID, mereka bisa menaikkan usahanya, *gitu*. Nah, ini yang menurut saya harus, harus dibicarakan kembali, didudukkan kembali, dan harus ada keputusan politik anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Nah, kepada Pak Zul. Saya kira stabilisasi harga ini penting, Pak. Hari ini memang kita dihadapkan kepada deflasi dan ini sudah mulai jadi pembahasan, kenapa terjadi deflasi. Kemungkinan besar kan ini karena instabilitas, karena situasi daya beli masyarakat yang mulai berkurang. Mohon mungkin agak dicek juga *nih*, Pak, ke lapangan ya. Karena ini persoalan-persoalan yang saya kira nanti akan ada dampak kepada sektor-sektor lainnya. Kita harus betul-betul waspada, harus betul-betul mencermati setiap pergerakan.

Kadang-kadang kita inflasi terlalu tinggi yang jadi korban malah petani, *gitu*, karena dianggapnya sektor pangan mendongkrak terhadap inflasi jika terlalu tinggi naik. Tapi kalau betul-betul ditekan kepada harga yang sangat rendah, petani, nelayan, juga mereka tidak mendapatkan untung yang cukup untuk bisa menghidupi kehidupannya. Nah, ini juga menurut saya ada di Kementerian Perdagangan, bagaimana menstabilkan posisi harga di pasar?

Tentu kami juga menyaksikan bagaimana Pak Zul sebagai Menteri Perdagangan rajin sekali turun ke lapangan, turun ke pasar-pasar. Dan saya kira ini juga membuat semangat baru, bahwa menteri juga sekarang turun ke bawah. Efeknya ada memang, partainya Pak Zul juga naik, *gitu loh*. Ada juga, ya itu, itu efek positifnya, *gitu* ya.

Nah, oleh karena itu, menurut saya, stabilisasi harga ini penting untuk juga menjadi PR terbesar di Kementerian Perdagangan, agar pertama, tidak menyulitkan terhadap konsumen sebagai pengguna produk, tetapi pada sisi lain juga harus diingat, kita memiliki UMKM, memiliki petani, memiliki nelayan, sebagai produsen yang harus kita lindungi.

Nah, sektor-sektor lain, saya kira juga ini, Pak Zul, impor juga jangan terlalu deras, ya. Memang ada neracanya, *gitu*, ada neracanya, tetapi mungkin harus lebih cermat, karena pada waktu kemudian impor terlalu deras

masuk, ini juga akan menekan terhadap tingkat produksi di masyarakat, petani khususnya.

Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, dan saya usul, Pak Haikal, pada kesempatan ini menurut saya taruh *gitu*, ditaruh berapa sesungguhnya atau disimpulkan berapa sesungguhnya kebutuhan ideal Kementerian Koperasi, berapa *sih* kebutuhan idealnya? Berapa *sih* hari ini mendapatkan anggaran? Sehingga diusulkan saja kebutuhan ideal, supaya menjadi catatan politik, catatan kesimpulan antara rapat kerja kita di sini, untuk bisa menjadi catatan penting di dalam pengambilan keputusan ke depan. Bahwa sesungguhnya Kementerian Koperasi itu ya butuhnya angkanya sekian. Kalau dari angka sekian, berarti seberapa persennya? Nah, sehingga rasionalisasi untuk menambah anggarannya berapa. Sama Kementerian Perdagangan, karena ini juga harus dibina.

Oleh karena itu, menurut saya, saya usul satu kesimpulan, berapa sesungguhnya angka ataupun *budget* yang tepat untuk bisa idealnya kementerian ini bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan di masyarakat.

Saya kira itu.

Terima kasih, lama-lama nanti malu sama Pak Zul yang pidatonya sedikit banget, *gitu*, tadi.

*Wabillah taufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Memang kalau sesama calon menteri ini *kan* harus ini, Pak, harus sama *nih*, *sharing* bagi ilmunya *gitu kan*.

Baik, kita ke Pak Sonny. Silakan.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA, S.H.):

Baik, terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati, Pimpinan, beserta
Segenap Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati, Pak Menteri Perdagangan, beserta seluruh jajaran,
Pak Menteri Koperasi,**

Pertama, saya menyambung saja tadi usulan dari Pimpinan Sidang. Jadi, kalau memang ini bisa diusulkan, diusulkan saja, tadi *gayung* bersambut. Pak Herman juga sampaikan, paling tidak jadi catatan politik, meskipun saya yakin di tengah, apa, ini dikurangi, apalagi Kementerian Koperasi itu 560 miliar berkurangnya. Kalau dua beliau ini *kan* selalu bangkit terus, saya pikir kenapa *kok* sanggup bangkit-bangkit terus? Oh, ternyata lahirnya bulan Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Dua-duanya itu lahirnya bulan Mei, sehingga punya semangat yang sama. Tapi *kan* kasihan nanti menteri yang ditinggalkan kalau lahir yang baru, kalau lahirnya *enggak* bulan Mei, *enggak* punya semangat yang luar biasa kayak *gitu*.

Kalau Pak Zul *kan* memang ahli. Kemarin saya lihat pidatonya waktu apa? Acara nasional itu *kan*, yang bantu selalu banyak, Pak, ya. Ahlinya ahli, suhunya para suhu.

Tapi sedikit saja di, apa, menjelang-menjelang terakhir ini, saya membaca arah kebijakan Kementerian Perdagangan soal, di antaranya pembinaan UMKM dan penganan perdagangan. Dan saya bersyukur sore hari ini, dua menteri yang terkait dengan itu, soal UMKM, bisa jadi sama.

Saya berharap, Pak Zul, di, saya *enggak* tahu habis ini jadi Menko atau *gimana*, Pak Zul, tapi terakhir bisa teriak soal pembinaan UMKM ini, apakah di dalamnya termasuk menyelamatkan UMKM dari kematian? Jadi, mohon maaf, kalau saya ikuti di berbagai media selama ini, tadi sudah sampaikan, memang sering terjun ke pasar, ke mana-mana karena memang juga membawa efek *elektoral*, kira-kira begitu, Pak Khaeron. Tapi soal *statement* tentang bagaimana agar UMKM kita tidak mati, karena ada misalkan *marketplace* Temu. saya tidak, apa, jarang mendengar itu, beda dengan Pak Menkop. Padahal itu bahaya sekali, Pak. Nah, nanti *kan* duduk bersama kayak *gini*, nanti bisa saling menyampaikan. Kalau yang menggaungkan itu dua menteri itu *kan* jauh lebih luar biasa.

Jadi, kalau dalam programnya soal mendorong UMKM agar kuat di *marketplace*, ya tidak seindah itu juga di dalamnya. Jadi, membina saja, sementara ada banyak *marketplace* yang, ya tadilah, contohnya Temu, bagaimana dari pabrik, ya Pak Teten, ya? Itu langsung. Ya ini pastilah kita akan, berapa usaha mikro kita yang, kalau dulu 60 juta, ya? sekarang berapa, nanti, nanti giliran, jadi saya kira itu.

Yang kedua, kalau dari perdagangan internasional, saya kira masih perlu memanfaatkan, apa, KBRI-KBRI kita dan sebagainya, itu sebagai etalase, sehingga itu bisa jadi contoh produk-produk di Indonesia.

Yang berikutnya. Kalau untuk Kementerian Perdagangan, tolong tadi stabilitas harga, khususnya sembako. Saya *sih* tidak *was-was*, tapi sebentar lagi Pilkada, jangan sampai ada mainan-mainan *gitu*, tiba-tiba sembako hilang, *tapi* ada calon yang punya sembako banyak, dibagi-bagi. Mampus kita, demokrasi kita akan semakin busuk kalau itu terjadi. Dan saya yakin, apa, Pak Menteri Perdagangan mampu untuk menjaga stabilitas itu.

Jadi, sekali lagi, ini pertama kali nanti serentak Pilkada itu jangan sampai buat mainan-mainan yang hanya untuk kepentingan sesaat. Jangan orang *milih* karena sembako hilang, sembako mahal, ada calon yang tiba-tiba ya punya banyak sembako, terus, ya lewatlah. Ada orang baik yang kalah hanya karena tidak memiliki itu.

Kemudian, kalau untuk Kementerian Koperasi. Pak Teten, saat ini *kan* sering kali, kalau Pak Teten itu mendengungkan soal data tunggal. Problem kita, data tentang UMKM itu yang, apa, yang masih tidak akurat, sehingga yang saya tahu, kemudian ada sistem informasi data tunggal, kalau *enggak* salah. Cuma sayangnya, kalau dari pernyataannya Pak, Bu Deputi, kalau *enggak* salah, ya? Itu *kok* targetnya itu, misalkan di empat provinsi itu harus 4 juta, 4 juta itu kira-kira itu dari persentasenya sudah 100% atau berapa persen? Karena pada sisi teknisnya, nanti sampai ke bawah misalkan kalau pencatatan untuk enumeratornya, itu yang juga ada anggarannya itu, *kan* ini hanya *ngejar*, *ngejar* jumlah itu dari sisi kualitas atau yang apa? Karena menurut saya itu penting.

Saya juga *enggak* tahu tadi, mohon nanti diberi gambaran, Pak. Seorang enumerator yang mencatat itu di bawah, itu diberi honorarium berapa *sih*? Termasuk nanti penganggarannya, itu yang paling penting kalau dari pendekatan legalnya untuk semacam hanya mengurus NIB atau sertifikasi? Sertifikat produk, termasuk produk halal dan sebagainya, karena itu yang banyak diminta oleh para pelaku UMKM kita.

Kemudian, dalam realisasi triwulan II, juga berbicara soal rumah produksi bersama. Meskipun masih dalam tahap pengadaan, tapi dalam rapat kerja pada bulan Juni yang lalu, rumah produksi itu, kalau saya *enggak* salah, itu akan juga berkoordinasi dan bersinergi kemudian dengan 17 kementerian/lembaga.

Jadi, *kerjaan* Kementerian Koperasi itu banyak, anggarannya sedikit, hanya diberi ruang untuk, apa, berkoordinasi dengan yang lain. Nah, saya *pengen* tahu perkembangannya seperti apa, karena menurut saya kalau itu bisa jalan dulu di diskusi di sini pada bulan Juni itu, ini membawa harapan yang cukup besar.

Terakhir, karena kita itu juga sama. Walaupun saya terpilih, saya *enggak* tahu akan di Komisi VI atau tidak, Bapak-bapak di kementerian juga masih di kabinet atau tidak. Tapi dalam soal korporasi petani, Pak Teten *nyebutkan* akan ada semacam *blueprint* untuk ke depan. Itu kira-kira targetnya kapan selesai?

Harapan saya sama dengan saya kemarin ketemu dengan Kementerian BUMN, di akhir penghujung pengabdian ini, masing-masing kementerian itu punya, punya satu catatan yang bahkan kita juga *pengen* tahu.

Kalau Kementerian Koperasi punya data UMKM, *gitu*, kalau kita misalkan dengan *effort* kita, dengan apa yang kami miliki, kita juga tahu data-

data pelaku UMKM di bawah seperti apa, kita juga bisa melakukan proses-proses pembinaan. Termasuk hal besarnya adalah apakah pelaku usaha mikro kita itu memang benar-benar serius bangun atau karena kepepet sudah *enggak* ada *kerjaan* lagi.

Tentu saja ini dalam konteks pembinaannya, seperti yang di, jadi arah kebijakan Menteri Perdagangan, itu akan sangat berbeda. Mengenali karakter pelaku usaha mikro, kita *kan* butuh sesuatu yang detail, sehingga sebagaimana usulannya Kementerian Koperasi, ya para pelaku usaha mikro itu tidak perlu banyak pelatihan, kalau *enggak* salah. Mereka yang dibutuhkan *tuh* hanya modal. Mereka yang *butuhkan*, bagaimana pasar ini bisa cukup luas dan tidak dimatikan oleh kekuatan-kekuatan yang lain.

Saya rasa itu saja, kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Silakan, Pak Muslim.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Pak Hekal, dan
Teman-teman Anggota Komisi VI,
Pak Teten beserta jajaran Kementerian Koperasi,
Pak Zul,
Pak Wamen, beserta jajaran Kementerian Perdagangan,**

Pertama, kepada Kementerian Koperasi, Pak Teten. Memang kalau kita lihat, anggaran yang mungkin dalam sejarah saya di Komisi VI, ini penurunan yang luar biasa. Kita lihat di sini dari koperasi 37,44%, ya, kalau kita lihat Kementerian Perdagangan, turunnya hanya 15,9%. Artinya apa? Ini sangat berdampak terhadap kinerja dari Kementerian Koperasi maupun Perdagangan.

Yang kedua, tentu, Pak Teten, berkaitan dengan anggaran yang hanya 937. Tentu kita berharap, *kan* ini menjadi program-program prioritas utama. Artinya apa? Ini mungkin bisa disisir kembali, sehingga target-target kita harapkan bisa maksimal. Jadi, sehingga dengan pagu anggaran yang terbatas ini, kita harapkan hasilnya juga bisa lebih kelihatan, Pak Teten.

Yang kedua, tentu saya melihat di sini, Pak Teten, kaitan dengan realisasi anggaran. Saya yakin hari ini 53,46%, *Insyallah* pasti terwujudlah. Yang kedua, capaian kinerja, Pak Teten. Saya sepakat, contoh di Aceh, Pak

Teten, dengan pengembangan seperti Nilam, ya. Saya lihat di sini misal peningkatan skala usaha mikro. Saya yakin kalau program-program seperti ini, ini harus didorong terus, Pak Teten, baik pun kerja sama dengan TNI maupun dengan pihak masyarakat.

Yang kedua, tentu kita harapkan ketika bicara Kementerian Koperasi, ini *kan* tidak lepas dari koperasi dan UMKM. Ini saya pikir menjadi garda terdepan. Yang kedua, kita lihat, masalah solusi nelayan. Ini penting, Pak Teten, karena saya beberapa kunjungan saya di beberapa daerah ini, saya tidak *ngerti* apakah posisi Kementerian Koperasi ada di mana, apakah hanya sebatas administrasi? Karena eksekusinya *kan* di Pertamina, Pak, setahu saya. Nah, kita harapkan *nih* proses ini juga bisa lebih mudah, karena saya tahu betul untuk mendapatkan SBUN ini agak panjang perjalanannya. Ini bagaimana supaya lebih singkat, Pak? Karena pengalaman saya kemarin itu hampir dua tahun mereka baru realisasi, saya yakin ini juga panjang.

Sementara kebutuhan para nelayan ini, daerah berbasis ini sangat penting. Bisa kita lihat di sini dari ada 9 SBUN yang telah selesai, 7 yang sedang proses, dan 53 lokasi. Saya pikir ini menjadi prioritas, kenapa? Kalau ini ditaruh daerah lain, dirasakan betul, Pak, manfaatnya oleh masyarakat.

Yang kedua, pengembangan UMKM. Tentu kita berharap keberadaan Kementerian Koperasi ini juga bisa menjadi motor, Pak Teten. Bagaimana melakukan pendampingan, mengarahkan para pelaku-pelaku usaha ini bisa lebih maksimal, sebagaimana memajukan koperasi. Jadi, peran Kementerian Koperasi bukan hanya mendirikan koperasi, tapi bagaimana melakukan pendampingan serta pelatihan-pelatihan kepada mereka dalam menjalankan UMKM itu.

Yang kedua, Pak Zul. Tentu saya melihat di sini, saya *gak* banyak ke Pak Zul. Saya beberapa kali saya sampaikan, kinerja, Pak Zul, kelihatan, Pak Zul. Saya merasakan betul, baik pun gula dan lain-lain. Bahkan hari ini, program Pak Zul ini, ini sudah merambah di semua BUMN, Pak, termasuk dari PTPN dan lain, semua bergerak, bahkan sangat diuntungkan petani hari ini.

Dan di beberapa daerah, *spirit* menanam tebu ini luar biasa. Artinya harus itu ada dampak positif yang selama ini kita hanya bergantung kepada beberapa perusahaan besar saja, misal *kayak* di Lampung, ya, Gulaku. Tapi hari ini PTPN-PTPN juga ikut terlibat dan melakukan kerja sama dengan masyarakat. Saya pikir ini, Pak Zul, cukup positif, ya. Kita harapkan terus bisa didorong.

Yang kedua, saya sepakat tadi, bagaimana melakukan penguatan perdagangan, khususnya *marketing* di luar negeri, Pak Zul. Saya lihat beberapa negara ini, biarpun di Kementerian Luar Negeri *kan* sudah ada yang membidangi kaitan dengan posisi pemasaran ini. Kita harapkan Kementerian Perdagangan, biarpun ada KADIN, misalnya di beberapa negara yang tidak ada perwakilan KBRI, ada KADIN. Saya harapkan di sini juga bisa mendorong. Bagaimana di sini, saya lihat ada ajuan ya, Surat Menteri

Perdagangan, permohonan tambahan anggaran. Ini saya sepakat, positif, Pak Zul, yaitu perwakilan perdagangan untuk produk Indonesia dan *market intern*. Saya pikir sangat positif, promosi, peningkatan ekspor, sangat penting.

Yang terakhir, Pak Zul, ini berkaitan dengan maraknya. Ini *kan* hari ini kita tidak, saya tidak *ngerti* bagaimana *ngerem nih*. Di satu sisi, kita lihat pasar-pasar tradisional sepi, Pak. Bagaimana derasnya masuk barang-barang impor yang *gak* terkendali ini. Saya *gak* tahu bagaimana skenario dari Kementerian Perdagangan ini, hari ini orang langsung *online*. Memang kita tidak bisa salahkan masyarakat, *tapi* begitu lancarnya, akhirnya kita bisa lihat di Tanah Abang, di beberapa pasar sepi, Pak Zul.

Ini mungkin ada langkah-langkah dari kementerian seperti apa, jadi sehingga derasnya masuk impor, baik sisi *fashion* dan lain-lain, saya pikir ini juga bisa pelan-pelan dikendalikan. Kalau *gak*, ini terus-terang yang paling kasihan adalah pelaku usaha UMKM lagi, Pak, di bawah ini, yang kecil-kecil ini. Kita lihat, misal di Bali, kemarin, apalagi di Tanah Abang, sebagian besar sudah, sudah tutup.

Yang terakhir, ini ada pesan, Pak Zul, dari Dapil saya ini, Aceh Timur, Pak Zul. Itu mereka di tahun 2023 itu sudah pernah diberikan pasar di sana, tapi setelah SK turun, akhirnya tidak, *dibatalin* karena anggaran sudah tidak ada, ditunda lagi. Jadi, sampai hari ini *nih*, belum terealisasi pasar itu. Ini kita harapkan nanti saya akan WA Pak Zul atau Pak Wamen nanti, mudah-mudahan harapan masyarakat di sana itu bisa direalisasikan tahun 2025.

Nilainya, saya lihat di sini *gak* besar, karena sesuai dengan, sekitar 3 miliar, kalau *nggak* salah, dari anggaran yang pernah dialokasikan, tapi akhirnya ditunda kembali, tidak dijalankan. Ini mudah-mudahan bisa direalisasikan di tahun 2025, Pak Menteri.

Saya pikir itu beberapa hal, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Baik, kita ke Pak Amin. Silakan.

F-PKS (AMIN Ak, M.M.):

Makasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan
Teman-teman Anggota Komisi VI saya hormati,
Pak Menteri, Pak Teten, dengan semua jajaran,
Pak Menteri, Pak Zul, dan
Wamen, dan semua jajaran yang saya hormati,**

Pertama, tadi saya mendengar *statement* Pak Menteri Koperasi UKM itu sangat berbahagia. Saya kira banyak orang yang berbahagia ya dengan keinginan dari Pak Presiden, agar RUU Perkoperasian itu segera diselesaikan, ya, walaupun ya, apa ya, ini masa sidang tinggal, ya berapa hari lagi *nih?* 20, 20-an hari lagilah sekian, kalau efektifnya, *enggak* sampai.

Tapi, setidaknya ini menjadi pelecut buat kita semua, baik dari eksekutif, Pak Menteri, ya, kita *enggak* tahu Pak Menteri, apakah masih jadi menteri di Koperasi UKM atau tidak, atau di tempat yang lain, kita *enggak ngerti*. Tapi minimal kan Eselon I-nya juga hadir semua, banyak yang hadir di sini. Dan juga Pimpinan DPR Komisi VI, ini menjadi komitmen bersama, *seandainya* toh meleset ini, *enggak* selesai di periode ini, minimal akan selesai di periode, awal periode depan, *enggak* usah *nunggu* sampai tahunan. Karena kita semua tahu, ya, undang-undang yang sekarang berlaku umurnya sudah 32 tahun ya, tentu kita sudah *enggak* usah bicara *lah*, pasti dampaknya luar biasa.

Banyak sekali praktik-praktik perkoperasian yang sudah tidak terakomodir ya, tidak tertampung dengan aturan-aturan yang ada. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi juga begitu banyak, yang juga tidak bisa kita selesaikan dengan undang-undang yang ada.

Pertanyaan, ada beberapa pertanyaan kepada Pak Menteri Koperasi, Pak Teten. Seingat saya, ketika Bapak awal-awal memimpin Kementerian Koperasi UKM itu, salah satunya itu mencanangkan strategi transformasi koperasi dan UMKM. Nah, tentu kita bertanya, Pak, sekarang. Kami bertanya, ini sesungguhnya sampai di mana Pak transformasi itu bisa dilakukan? Ya, sudah sampai di mana? *Gitu*. Dan apakah kebijakan atau desain program yang menjadi fondasi strategi transformasi untuk tahun-tahun berikutnya itu benar-benar Bapak sudah buat dengan *milestone design*, *grand designnya* barangkali.

Sekali lagi, ini kita bicara institusi, tidak bicara personal, ya. Mungkin Pak Teten sebagai Menteri Koperasi akan berpindah pos ya, tapi secara institusi, kementerian ini adalah komitmen dari Kementerian Koperasi UKM ya, yang dulu dicanangkan 5 tahun lalu, sekarang capainya sampai di mana? Dan untuk ke depan bagaimana kita mewujudkannya itu? Itu yang pertama, Pak.

Masih, masih terkait dengan yang pertama. Seingat saya, dulu Kementerian Koperasi juga punya program-program prioritas, ya, d awal-awal itu, yang saat ini saya belum mendengar ya, apakah ini saya yang kurang mengikuti atau bagaimana, ya. Contohnya misalnya minyak makan merah, sampai di mana produksinya? Ya, dan ini *kan* seingat saya sudah diinstruksi

oleh presiden untuk diproduksi lebih luas. Kira-kira berapa pabriknya yang sudah dibangun? Ya, di mana saja, *gitu*, capaiannya seberapa besar? Itu yang kedua.

Juga program yang lain, misalnya koperasi modern. Ini sejauh mana *sih* program ini sudah diwujudkan? Berapa banyaknya? Ada di mana saja? Ya? Kemudian praktiknya *tuh* di lapangan berapa? Tentu saja *enggak, enggak* hanya sekedar data. Kita *enggak* hanya bicara sekedar data, tapi juga bagaimana benar-benar koperasi modern itu, ya, memenuhi kriterianya sebagai koperasi modern dengan berbagai macam aktivitasnya.

Kemudian yang ketiga, tadi sudah disinggung oleh beberapa kawan tentang basis data UMKM *nih*, Pak. Pendataannya itu sampai sejauh mana, Pak? Dan kita juga belum mendengar publikasinya. Selama ini kita selalu bicara UMKM kita itu ada, ya, 64 juta, *gitu* ya, kemudian menyumbang PDB sekian, *gitu* ya, ya dan seterusnya, dan seterusnya, begitu. Menyerap angkatan kerjanya sekian ya, sampai 97%. Tapi ini *update upgrade*-nya itu seperti apa, Pak? Untuk saat ini, dan bagaimana tentu perencanaannya ke depan?

Dan yang berikutnya, Pak, ini saya kira pentingnya kita membangun ekosistem bisnis wirausaha kementerian, apa, Koperasi UMKM. Ini sejauh mana Bapak mencanangkan itu, di antara keluhan-keluhan di lapangan itu ya, praktisi-praktisi atau orang-orang yang terlibat dalam urusan perkoperasian itu mereka juga kesulitan, Pak, mengalami kesulitan mengakses program-program dari Kementerian Koperasi. Nah, bagaimana Bapak melakukan sosialisasi, melakukan *connecting* dengan misalnya dinas-dinas di bawah ya sampai kabupaten. Itu saya kira untuk Kementerian Koperasi & UKM.

Kemudian, untuk Pak Zul, Kementerian Perdagangan, Pak. Yang pertama ini, Pak, yang saya kira ini sering jadi keluhan di lapangan, Pak, tentang fluktuasi harga. Fluktuasi harga, khususnya ini yang berdampak pada pelaku UMKM, ya. Fluktuasi harga yang sering terjadi itu dan tidak bisa diprediksi ini, ini bukan saja menjadikan pelaku, ya, usaha menengah kecil ya, kecil menengah mikro itu rugi, tapi gulung tikar. Dan itu banyak sekali.

Nah, kalau kita bicara fluktuasi harga, ya oke *lah*, yang misalnya yang terkait dengan produk-produk besar berhubungan dengan luar negeri, ada faktor kurs dolar, seperti misalnya batu bara atau sawit, yang juga itu nantinya dampaknya tetap *aja* ke dalam negeri. Tapi yang khusus ya, yang ada di dalam negeri *aja*, Pak, ya, dan itu banyak menimpa UMKM, misalnya harga telur, kemudian harga tepung, kemudian harga panen, tomat, *cabe*, dan sebagainya. Ini banyak sekali, Pak, menjadikan para UMKM kita itu bangkrut ya dan itu jumlahnya tidak sedikit, karena apa? Karena kita ya di dapil berinteraksi dengan mereka, dan setelah mereka itu bangkrut, mereka *enggak* bisa bangkit lagi. Nah, ini masalah. Ini saya kira PR besar ya, bagaimana Kementerian Perdagangan membuat atau merencanakan atau membuat *grand design*, sehingga hal ini *enggak* terus terjadi berulang, *gitu*. Itu, Pak Zul, ya.

Mungkin kalau yang di luar negeri ada faktor luar, kurs dolar, eksportnya. Oh, ini harganya meningkat demikian, sehingga pengaruh ke harga dalam negeri. Minyak kita, para produsen CPU cenderung ekspor keluar, apalagi sekarang DMO, DMO-nya *enggak* ditentukan dari jumlah produksi, tapi dari jumlah ekspor ini kalau *enggak* salah terbaru ini. Nah, ini faktor luar lebih menarik, tapi yang di dalam negeri yang ditentukan oleh faktor dalam negeri, saya kira ini semua *controlable* mestinya kalau kita bisa rencanakan dengan baik.

Ya, saya kira saya cukupkan itu saja pertanyaan dari saya. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Muslim, yang terakhir, karena kita juga *dikeluhin* oleh banyak pihak, Pak, terkait maraknya produk-produk dari luar masuk ke dalam, ke negeri kita ini dan itu, apa namanya, PHK terus-menerus terjadi sampai hari ini, ya. Kalau kita merujuk data tahun lalu, serapan tenaga kerja dari investasi yang memang memenuhi target dari sisi jumlah, serapannya *cuman* 900.000, tapi sementara PHK-nya ada 1,6 juta. Nah, ini *kan* tentu sangat tidak baik bagi bangsa kita.

Demikian, Pimpinan. Terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Baik, Bapak Abdul Hakim Bafagih.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih, Pimpinan.

Izin, Om Demer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan, dan Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Pak Teten, Menteri Koperasi UMKM, dan juga seluruh jajaran Kementerian Koperasi,
Yang saya hormati, saya banggakan, Menteri Perdagangan, Ayahanda Zulkifli Hasan, beserta seluruh jajaran Kementerian Perdagangan,**

Pertama-tama, saya akan ke Kementerian Koperasi terlebih dahulu.

Pak Teten,

Pada prinsipnya, anggaran ini, kalau kami dari Komisi VI, selama itu selaras dengan target-target yang akan dicapai oleh Kementerian Koperasi,



itu tentu berkaitan dengan usulan penambahan, mengapa tidak? Dan saya sepekat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Herman Khaeron tadi, disampaikan saja kepada kami kira-kira yang diperlukan sampai dengan berapa.

Namun, ada beberapa catatan dari kami, Pak Teten. Saya masih ingat betul tahun lalu itu, Mitra Komisi VI ada dua, Kementerian Koperasi dan Kementerian Investasi, menganggarkan itemnya hampir sama, yaitu pendataan berkaitan dengan UMKM. Anggaran di dua Kementerian ini, jika ditotal, hampir 1 triliun.

Dan sampai dengan sekarang, kami belum melihat, Pak, pendataan UMKM yang telah dilakukan itu yang kalau *enggak* salah di Kementerian Koperasi, itu nilainya 400 miliar, 400 atau 600 miliar, itu belum melihat dengan jelas. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan kepada kami, karena masih ada satu kali rapat lagi dengan Kementerian Koperasi, itu mungkin nanti bisa dipresentasikan kepada kami.

Kemudian, yang kedua, catatan dari kami, Pak, berkaitan dengan pengawasan terhadap koperasi. Saya masih ingat ketika rapat dengan *panjenengan*, itu pasti saya menyuarakan bagaimana progres tentang koperasi-koperasi bodong, Pak, yang kemudian kasusnya mencuat kemarin itu. Indikasi kerugian masyarakat itu hampir 8 triliun, kalau *enggak* salah, Pak, ya. Nah, itu progresnya, itu mungkin nanti bisa disampaikan, Pak, minggu depan juga, Pak, karena kasihan, Pak. Ini kedoknya koperasi, tapi dalam tanda kutip ternyata judulnya seperti maling, Pak. Itu mohon disampaikan kepada kami, Pak, karena kasihan, Pak, banyak masyarakat kami, di Dapil kami yang *kegerus*. Bahkan yang kasusnya sempat muncul keluar itu Indosurya, Pak, ya, Indosurya itu. Saya, kita sama-sama *enggak* tahu, sekarang *gimana* posisinya itu, Pak? Status hukumnya seperti bagaimana? Dan kejelasan pengembalian kepada anggotanya seperti apa? Itu mohon menjadi perhatian.

Kemudian, ke Kementerian Perdagangan, Ayahanda Zulkifli Hasan. Prinsipnya Komisi VI, *Insyallah*, mendukung Pak Menteri untuk usulan penambahan 500 miliar, *cuman* ya sepertinya ini nanggung, ya *kan*. Kalau bisa sekalian yang lebih besar juga *enggak* apa-apa, karena kasihan juga nanti Atdag-atdag yang di luar, yang punya target besar untuk mempromosikan Indonesia, tidak memiliki anggaran yang cukup.

Dan izin, Pak Menteri. Kemarin itu ada RDPU yang kebetulan dari dapil, dari dapil juga, ada dua asosiasi pabrik *micin*, Pak Menteri, dan juga pabrik keramik, karena kebetulan banyak di dapil saya juga pabrik-pabriknya itu. Yang pabrik *micin* itu kemarin itu memohon untuk dari pemerintah melakukan pengendalian berkaitan dengan ekspor tetes dan juga importasi *micin*. Jadi, yang disampaikan mereka kemarin itu, kalau tidak dikontrol, kasihan, nanti produsen-produsen yang dalam negeri ini, kalau ada goyangnya, khawatir masyarakat di Dapil terancam, Pak Menteri.

Dan juga dari kesehatan, ternyata mengerikan ini *micin-micin* yang impor ini, kandungan klorinnya. Kasihan *kan*, kalau bikin nasi goreng, soto, pecel, itu kalau *enggak* dikasih *micin*, itu kurang *makces*, *gitu loh*, Pak Menteri. Jadi, mungkin bisa menjadi perhatian juga.

Dan yang kemudian berkaitan dengan asosiasi keramik, Pak Menteri. Kemarin mereka juga menyampaikan bahwasanya, ya tentu kalau kita disuruh bersaing dengan, mungkin dari negeri Cina, ini *kan* kalah, kalah saing. Mungkin bisa diterapkan, entah itu kebijakan dumping atau mungkin pengendalian berkaitan dengan importasi keramik-keramiknya.

Saya rasa itu dari kami, Pak Menteri Perdagangan, dan Pak Teten. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Iya, kemarin lupa saya tadi. Memang ada dua audiensi yang kita lakukan, RDPU, yang nanti habis Anggota selesai bertanya, saya bacakan *aja*, karena memang tertuju kepada Kementerian Perdagangan.

Baik. Pak Gde Sumarjaya Linggih. Silakan, Pak.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Terima kasih.

**Ketua Komisi VI, dan
Rekan-rekan DPR RI yang saya hormati,
Pak Menteri, baik Menteri UKM maupun
Menteri Perdagangan yang saya hormati,**

Sebenarnya, saya sebenarnya sangat prihatin terhadap kondisi Komisi VI, Pak. Kenapa saya prihatin Komisi VI, Pak? Komisi VI ini anggaran seluruhnya *enggak nyampai* 5 triliun, Pak, mitranya, Pak. Jadi, tidak Bapak *aja* yang prihatin. Komisi VI *aja*, Pak, ini mungkin Eselon III-nya di, apa, di Departemen Pendidikan atau di PUPR, *begitu*, Pak, *enggak nyampai* 5 triliun.

Sementara di sini tuntutananya sangat besar, Pak. Kita tahu bahwa komponen pertumbuhan kita itu adalah, misalnya, BKPM, investasi, Pak. Kemudian, Bapak Perdagangan, ya, ekspor impor. Itu *kan* semua komponen daripada peningkatan pertumbuhan, Pak. Jadi, ini menyedihkan juga, Pak.

Kemudian, kita diharapkan untuk pertumbuhan yang berkualitas, di mana timbul pelaku baru, Pak. Ini tugasnya Kementerian UMKM dan Koperasi, Pak, untuk menimbulkan pelaku-pelaku baru dan menjadi kebanggaan teru. Kketika krisis ini, UMKM kitalah yang membantu, UMKM kitalah yang berjaya, yang akhirnya kita terhindar dari krisis, *gitu kan*. Itu, Pak, ya, ini kondisi kita.

Dan, saya terus-terang, keprihatinan ini, karena kalau di swasta kami, Pak, kalau mau omset kami meningkat, ekspor kami meningkat, Pak, kami pasti *nambah* ikut pameran ke mana-mana, Pak. Iya, Pak, betul, Pak, ya? Ya, itu, itu *kan* kami pasti *nambah budget* untuk itu, *budget* untuk *marketing*, itu *gitu*. Nah, karena Bapak juga tugasnya yang lain, yaitu membatasi impor, Pak, mem-*barrier* impor, Pak, tentu juga harus diperbesar juga, apa, anggaran untuk melakukan *barrier* terhadap impor itu sendiri, *gitu*.

Nah, tadi banyak teman mengomentari, banyak ini, apa, impor, Pak, sekarang tolong Bapak bantu ini, ya tapi anggaran Bapak *diturunin*, *gimana* caranya, Pak, *gitu*? Maraknya impor, tapi berusaha untuk, menghilangkan atau mengurangi daripada banjirnya impor kita. Ini keprihatinan saya *aja*, Pak.

Saya berkeluh-kesah *aja*, Pak, sama-sama dengan Bapak, *gitu*, ikut prihatin *aja*. Apalagi karena ada Hakim, ada Pak John di sini. Kalau saya kritis nanti, ada lagi Wamen saya di situ, Pak. Kalau kritisnya, nanti saya bisik-bisik *aja* sama Bapak, Pak, *gitu*.

Jadi, keluhan saya begitu, juga, Pak, dengan Bapak, Pak, dengan Kementerian UMKM ini. Pak Teten, kita beberapa kali, Pak, dari dulu, Pak. Sudah berapa tahun kita bermitra. Saya kebetulan, kalau di Komisi VI sudah empat periode, dan tiga periodenya bermitra dengan komisi, dengan Kementerian UMKM ini, ingin menggabungkan program-program pembinaan UMKM di 17 kementerian, Pak, ya? 22 kementerian itu, pembinaan di 22 kementerian itu untuk digabungkan, sampai sekarang belum. Mudah-mudahan nanti ada reformasi tentang bagaimana kita mengelola UMKM-UMKM kita ini dengan baik.

Database tentu sangat penting, Pak, untuk segera diperbaiki. Tapi saya juga *enggak* bisa *nuntut* banyak, anggaran Bapak turun, *gimana database* mau diperbaiki, *kan gitu*, Pak. Belum lagi nanti, coba mungkin Bapak *sinergitas* antara BUMN kita, Pak.

BUMN kita ini *kan*, sekarang ini sedang membuat juga pembinaan terhadap UMKM kita melalui Senyum, namanya, Pak, ya, antara BRI, kerja sama BRI, PNM, terus kemudian dengan Pegadaian, Pak. Itu mereka membuat satu atap untuk pembinaan kepada UMKM. Dan juga ditugaskan Sarinah, BNI juga ditugaskan untuk hal itu. Mungkin ini menjadi sebuah, apa, perlu *disinergitaskan* lagi, Pak. Artinya, karena kondisinya demikian, inovasi dan kreativitas jadinya, Pak, *gitu*. Berinovasi, berkegiatan jadinya, untuk bisa mensinergikan itu, ya, dengan kondisi yang apa adanya, *gitu* ya. Saya harapkan ini, timbul inovasi dan kreativitas juga. Mungkin Menteri Perdagangan perlu inovasi dan kreativitas lebih, Pak.

Kalau tidak, ini targetnya Bapak naik, ya, target Bapak naik, kemudian, tuntutan teman-teman untuk menjaga impor jangan terlalu besar, *gitu*. Ini anggaran turun, ya, ini agak, logika saya agak belum pas ini. Jadi, memang harus salah satu jalannya adalah inovasi dan kreativitas Bapak dipentingkan ini, termasuk teman-teman di, Eselon I-nya di perdagangan ini, bagaimana berinovasi, berkreaitivitas.

Itu, saya tidak komentar, Pak, karena, saya *enggak* berani komentar. Karena turun, *enggak* berani komentar, Pak, kalau naik, ya, saya akan kritik habis juga *nih*, apa saja. Kalau naik, saya akan teliti habis, apa saja, *nih*, Bapak, *nih*, kenaikannya untuk apa *aja*, kan, *gitu*, Pak. Jadi, kalau sudah turun *gini*, sedih juga, Pak. Kita di Komisi VI ini memang menyedihkan kalau anggaran, Pak.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Biar Bapak-Bapak *ngerti* kenapa beliau begitu *concern*, karena memang namanya agak kuat untuk duduk di depan sini lagi, periode depan.

Baik. Ibu Siti Mukaromah, silakan.

F-PKB (SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.A.P.):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

**Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI yang kami hormati,
Pak Menteri Koperasi dan UMKM, serta
Bapak Menteri Perdagangan, serta
Bapak-Ibu, seluruh jajaran yang kami hormati,**

Terima kasih kesempatannya.

Pertama, tentu, mengapresiasi dengan apa yang sudah dipaparkan, termasuk pencapaian yang sudah dicapai, baik oleh Kementerian Koperasi maupun Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan penggunaan anggarannya pada, sampai di awal September ini. Semoga sesuai dengan, apa, target akan bisa tercapai, sesuai dengan target yang sudah direncanakan oleh kementerian.

Pak Menteri dan semuanya saja,

Tentu mungkin hal yang saya sampaikan juga tidak jauh berbeda dari teman-teman yang lain. Akan tetapi tentu harus kita suarakan juga, agar



bahwa apa yang tadi menjadi bagian dari yang hari ini, apa, dilaksanakan dan sebagai anggaran yang ada di kedua kementerian ini, juga menjadi bagian dari suara dari kita semuanya.

Pertama, tentunya, Pak Menteri Perdagangan. Kita juga ingin mengingatkan atau menyampaikan tentang, apa namanya, tadi disampaikan Pak Muslim tentang bagaimana banjirnya impor dari Cina, ya, Pak, ya? Bagaimana Cina itu barang-barangnya itu membanjiri impornya ke Indonesia yang sangat luar biasa dan harganya juga sangat murah. Dan ini tentu saja sekali lagi, yang mengganggu pada perkembangan UMKM yang ada di negara kita ini. Jadi, kita berharap itu menjadi bagian dari hal penting yang menjadi perhatian khusus dan juga ini, sangat mengganggu untuk masyarakat kita yang sebagai pelaku UMKM, tentunya.

Terus, yang kedua juga, bagaimana tentang kebijakan Kementerian Perdagangan menyikapi *cross border trading*, ya, Pak, ya? Kaitan dengan barang yang masuk tanpa melalui proses pemeriksaan pabean. Nah, ini saya pikir juga bagian dari dampak *e-commerce* yang tentunya merugikan bagi pelaku usaha atau barang-barang lokal yang ada.

Dan saya pikir ini harus menjadi bagian dari yang harus dikuatkan tren di, apa, mulai dari Kementerian Perdagangan, bahwa bagaimana, apa yang harus dilakukan dengan konsep kita mencintai produk dalam negeri, dan tentunya harus ada kebijakan yang optimal dari Kementerian Perdagangan.

Selanjutnya juga, kita juga ingin tahu bagaimana prioritas Kemendag dalam hal daya saing UMKM. Karena tadi disampaikan tentang banyaknya UMKM, 22 kementerian, semuanya punya, apa, *concern* ke sana, bahkan kemudian lembaga-lembaga dan kemudian juga dari BUMN-BUMN juga punya *concern* yang sama.

Saya pikir memang saya juga setuju, seperti tadi Pak Demer sampaikan, adanya *database* yang tersinergi antar seluruh kelembagaan atau kementerian. Jadi, tidak ada tumpang-tindih, Kemendag punya *database* sendiri, Kemenkop punya sendiri, tapi kalau bisa itu tersinergikan. Jadi, ketika siapa pun, kementerian mana pun yang mempunyai *concern* untuk memberikan perhatian penuh kepada pengembangan UMKM, itu menjadi kekuatan bersama. Datanya ada Satu Data.

Jadi, mungkin bisa jadi katakanlah 1 sampai 1000 adalah data yang dipegang fokus oleh Kemendag, maka Kemenkop *enggak* perlu untuk kemudian 1 sampai 1000 juga diperhatikan oleh Kemendag, eh Kemenkop, tapi bisa Kemenkop pada nomor yang selanjutnya. Jadi, dengan cara seperti itu, seluruh UMKM yang semuanya punya keinginan maju, bisa mendapatkan perhatian khusus dari negara, dari pemerintah yang kita cintai.

Kemudian juga, Pak Menteri Koperasi, Pak Teten. Kita juga tentu ingin menanyakan kembali tentang bagaimana tugas fungsi secara detail tentang KADIN, ya, termasuk progresnya itu kan. Karena kita berharap bahwa KADIN hari ini menjadi bagian dari salah satu, apa namanya, bagian yang

mendapatkan dana APBN, tapi progresnya atau perhatian KADIN tersebut juga tidak sampai kepada koperasi-koperasi secara umum. *Subhanallah*, mohon maaf. Dekopin, *sorry, sorry*, saya, mohon maaf. Dekopin, maksudnya, ya. Dekopin ini *kan*, apa namanya, bagian dari yang mendapatkan APBN, ya, Pak, ya. Tapi kemudian secara masif kepada Koperasi, itu tidak semuanya tersentuh. Jadi, saya pikir tugas fungsi posisi Dekopin juga harus bagian dari yang, tentunya, karena itu di bawah Kementerian Koperasi UMKM, maka kita butuh posisi Dekopin ini lebih optimal, lebih diperjelas.

Karena saya masih ingat, Pak Hekal, waktu kita periode lalu membahas tentang Undang-Undang Koperasi, salah satu terhentinya juga di situ, ya, Pak, ya. Salah satu terhentinya adalah di pasal tentang Dekopin juga. Jadi, makanya ke depan, butuh ada kesepakatan bersama tentang posisi Dekopin itu seperti apa dan apa kemanfaatan eksistensinya sejauh mana. Itu, seperti itu.

Kemudian juga, mungkin Pak Menteri Koperasi, saya ingin dan berharap bahwa kira-kira ini *kan* sudah di akhir periode di 5 tahun, 2019-2024. Nah, ketika Kementerian Koperasi dan UMKM adalah kementerian yang logikanya di dalamnya seluruh urusan, apa, koperasi dan UMKM ada di situ, nah, dengan situasi hari ini, kita berharap ke depan, kira-kira, kita koperasi atau UMKM ini ke depan, rekomendasikan apa yang sekiranya bahwa itu betul-betul bisa menjadi harapan pelaku usaha yang meningkatkan ekonomi kesejahteraan rakyat yang betul-betul ke depan bisa kita wujudkan?

Karena pada titik hari ini, tentunya, ya, kita masih belum bisa berbangga dengan ada menjamurnya UMKM. Karena faktanya juga masih banyak yang UMKM itu tidak bisa hadir untuk meningkatkan kesejahteraan dan lebih-lebih ke belakang, hari ini UMKM juga semakin, eksistensinya semakin menurun.

Jadi, mungkin ada hal yang perlu diberikan. Dan tentunya kita, walaupun saya *enggak* tahu kita juga masih di Komisi VI atau tidaknya, tapi saya pikir kita harus punya sebuah *legacy* yang baik untuk ke depan, sehingga kehadiran Kementerian Koperasi dan UMKM juga lebih optimal, untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia.

Saya pikir itu, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Pak Jon, silakan.



F-PAN (Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan, dan
Teman-teman Anggota Komisi VI,
Pak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan, serta jajaran yang
mendampingi,
Pak Teten, serta jajaran yang mendampingi,**

Saya langsung *mengkerucut* saja dengan persoalan kekurangan anggaran yang jauh diturunkan dari target yang diharapkan. Mungkin, Pimpinan, dalam kesimpulan kita perlu pertegas, bahwa rencana Pak Prabowo ini bersama kabinetnya tentu ingin tumbuh dengan target 7-8%. Nah, kalau kita bicara pertumbuhan, ada empat faktor yang melatarbelakangi pertumbuhan tersebut.

Faktor pertama, yaitu belanja masyarakat, ini komponennya mungkin lebih dari 55%. Nah, ini letaknya di Pak Teten, karena UMKM, lebih dari 90%. UMKM itu ada di Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, kemudian sisanya itu investasi dan ekspor-impor, itu ada di Perdagangan, Pimpinan. Artinya, tiga komponen pokok itu ada di Komisi VI.

Nah, yang urusan belanja, *government spending* itu ada di komisi lain, *nih*. Jadi, seharusnya strategi keuangannya, saya berpikir harus mitra yang di Komisi VI ini yang didahulukan, *gitu*. Karena kalau tiga komponen ini bisa rampung dengan target-target yang dikerjakan, dengan dukungan finansial yang *strong*, ini saya yakin pertumbuhan 7-8% itu bisa tercapai. Sangat tidak mungkin itu bisa tercapai kalau ini dipotong, apalagi Kementerian Perdagangan sampai 50%, Pak Teten tadi sudah 37%. Jadi mungkin di kesimpulan kita agak pertajam dengan latar belakang itu, Pimpinan.

Terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI
DPR RI):**

Walaikumsalam,

Baik, daftar penanya sudah habis.

Saya tadi harus menyampaikan juga ada dua audiensi, Pak Mendag, yang terjadi, yaitu pada tanggal 26 Agustus 2024, Komisi VI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia.



Jadi, mereka berterima kasih kepada Kementerian Perdagangan yang sudah akan menerapkan tarif untuk barang masuk impor, tapi mereka tentunya mengharapkan lebih.

Dalam penyampaian mereka ke kami, sebetulnya ini saya singkat *aja*. Mereka berharap bahwa bea masuk dumping yang ideal adalah di minimal 80% ke atas. Kalau memang itu belum bisa dipenuhi, karena kan kalau *nggak* salah keputusannya 40%, ya, Pak Menteri? 60, ya? 40 sampai 60.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

(tidak menggunakan mic)

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

15? Sudah lumayan mendekati, ya?

Di luar itu, mereka juga *kepingin* adanya pembatasan volume impor terhadap keramik ini. Dan, kalau ini semua, Pak, ini semua industri juga berharap ada tambahan HGBT, itu harga gas untuk tertentu, tapi ini urusannya dengan Kementerian Perindustrian.

Dan ini yang tadi kita bicara di belakang, kalau bisa, pelabuhan pintu masuk barang impor keramik, dan mungkin bisa yang lain-lainnya, dipindahkan dari luar, eh ke luar Pulau Jawa. Ya, *preferably* mungkin ke daerah Indonesia Timur. Ini bisa menjadi berita bagus juga buat Pak Teten dan jajarannya, *kan*.

Kemudian, yang pada tanggal 3 September, kita mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Perkumpulan Pabrik Mononatrium Glutamat dan Asam Glutamat Indonesia. Ini agak mirip-mirip, *cuman* dia meminta kalau bisa volume ekspor tetes yang dari gula bisa dikendalikan atau diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Karena menurut mereka, ini lebih banyak dikeluarkan ketimbang dijual dalam negeri.

Kemudian, berharap supaya MNG yang impor itu bisa dikendalikan dan dimintakan menggunakan SNI, terutama yang dari Tiongkok. Kalau bisa dimasukkan ke dalam daftar Lartas. Dan sama juga, kalau ini meminta harga gas bumi, tapi itu dengan mitra yang berbeda.

Nah, ini sebetulnya semua konstituennya Pak Darmadi, makanya beliau datang terakhir. Pas betul memang ada *feeling*-nya, *gitu kan*. Tapi *gimana* pun juga, karena mereka semua industri dalam negeri, dan kita juga ingin meningkatkan TKDN, dan tentunya menjaga supaya lapangan tenaga kerja bisa terpelihara di tengah berita banyaknya PHK, dan seterusnya. Ya, kita juga akan meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk bisa merumuskan, apa, mekanisme atau peraturan terhadap permintaan-permintaan tadi.

Silakan, kita berikan kesempatan untuk menanggapi semua yang disampaikan. Kita, Pak, Wah, ini *udah*. Silakan Pak Menkop dulu. Saya *enggak* enak, mau *mutus*, lempar-lemparan.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Tadi saya *duluan*, sekarang saya minta Pak Mendag *duluan*.

Ayo, Pak Mendag.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Sudah ngomong *aja*.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Iya, baik.

**Ketua, dan juga
Para Anggota Komisi VI,**

Saya, terima kasih atas simpati dan dukungan terhadap kami untuk tadi, ada peningkatan anggaran. Memang mungkin begini ya, apa, setelah kami selama 5 tahun ini, memang selalu perdebatannya *kan*, ini *kan* kalau tidak ada pengarusutamaan UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional, barangkali memang *enggak* akan ada peningkatan anggaran ini, ya. Sementara secara teknis, Kementerian Keuangan dan Bappenas menganggap anggaran untuk UMKM itu sudah cukup besar, yang menyebar di 22 kementerian dan 40 lembaga.

Nah, karena itu waktu awal kementerian, sebelum COVID, Pak Presiden dan juga sudah sepakat untuk mengkonsolidasi seluruh anggaran yang menyebar di 20 kementerian itu di Kementerian Koperasi. Sehingga dengan begitu, perencanaan, ya, program untuk mengejar target-target transformasi UMKM dan Koperasi itu bisa jauh lebih mudah, *gitu*. Kalau tersebar *gini kan* susah.

Jadi, Kementerian Koperasi, yang kementerian kelas 3, harus mengkoordinasi 22 kementerian itu, *enggak* gampang, ya. Nanti apakah kita dengan kendali data juga, pasti juga *enggak* gampang.

Nah, pengarusutamaan ini menjadi penting. Pengarusutamaan koperasi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional itu menjadi penting, karena industri *kan* terus mengalami *deindustrialisasi*. Hari ini *kan* sejak 2008 turun, tinggal 18%. Karena itu, 97% lapangan pekerjaan *kan* di UMKM.

Nah, kita berharap *kan* memang sebagian besar UMKM ini *kan* ya bukan mau bisnis tadinya, tapi karena kepepet, tadi yang Bung Sonny bilang. Karena *enggak* ada di sektor formal, lapangan kerja sektor formal, akhirnya bikin usaha sendiri.

Nah, artinya kalau hari ini kita berharap ada industrialisasi kembali seperti tahun 80-an, menarik investor asing, menarik perusahaan *multi* industri manufaktur yang *labor* intensif ke Indonesia untuk menyerap tenaga kerja, menurut saya juga agak, agak mustahil. Karena saya sudah lihat, tidak ada alasan sekarang industri-industri itu untuk relokasi, karena mereka sudah menggunakan teknologi yang modern sekarang, *smart factory* IoT yang *enggak* membutuhkan lagi buruh sekarang. Saya sudah lihat perkembangan itu.

Nah, karena itu, maka justru tekanannya bagaimana kita mengeskalasi kekuatan bisnis UMKM ini. Nah, ini yang menurut saya mungkin harus ke sana dulu, sehingga nanti kalau sudah ada pengarusutamaan, urgensi tentang pentingnya UMKM diprioritaskan di dalam pembangunan ekonomi nasional, apalagi untuk mengejar target 2045. Kita harus akan masuk, kita prioritaskan untuk masuk negara berpendapatan tinggi, yaitu 30.000 dolar per kapita, hari ini 4.500, *enggak* mungkin kalau, tidak akan tercapai kalau tidak ada peningkatan kualitas lapangan kerja di UMKM, yang hari ini 96%-nya itu mikro, ya, dari 97%, *kan* 96%-nya mikro. Mikro itu ya tidak produktif, di bawah UMR, dan lain sebagainya.

Nah, jadi saya terima kasih sekali, tapi mungkin harus *background*-nya harus ke sana, itu. Kalau kami disuruh menyiapkan ini, mungkin untuk Komisi VI, kami akan siapkan nanti secara tertulis, karena saya kira Pak Jon betul sekali itu tadi.

Nah, kalau kami begini, yang *urgent* mungkin selain anggaran kementerian tadi, juga hari ini sejak kuartal III, sebenarnya tahun lalu sampai hari ini *kan* terjadi, terjadi penurunan indeks bisnis UMKM karena daya beli masyarakat rendah, sehingga omset turun, maka NPL-nya tinggi sekarang, di atas empat, sebelumnya di bawah tiga. Sehingga *urgent* menurut saya dalam situasi sekarang, apalagi sudah deflasi, mungkin yang harus di kedepankan oleh Komisi VI salah satunya adalah program restrukturisasi untuk para pelaku UMKM, ya.

Restrukturisasi karena mereka sudah, tadi, NPL-nya sudah di atas koma 4, di atas 4. Jadi, perlu ada restrukturisasi untuk penundaan pembayaran cicilan KUR, *gitu* ya atau mungkin juga subsidi, subsidi bunga ya, dan kalau bisa mungkin juga untuk mendorong pemulihan ekonomi untuk UMKM yang mikro, mungkin di 0%-kan bunga ya. Jadi, pemerintah mensubsidi.

Termasuk juga menghilangkan, mencabut, apa, penghapusan kredit yang KUR yang sudah lama macet. Karena kalau masih tadi kena SLIK OJK, ya bank juga *enggak* bisa menyalurkan. Saya kira kami sudah usulkan itu, cuma masih *nunggu* ininya, PP-nya, PP-nya di Kementerian Keuangan, ya. Kami sudah cukup hitung, *enggak* terlalu banyak dan tidak perlu kebijakan fiskal lagi, karena cadangan di bank sudah bisa menutupi itu, kalau penghapusan, *gitu*.

Lalu yang kedua, yang ini dari segi pembiayaan. Ini *kan* begini, tadi saya sudah, ini, KUR itu meskipun kita naikkan berkali lipat pun, itu dampaknya kecil sekali untuk menurunkan angka UMKM yang *unbankable*. Ya, karena bank masih, selain menggunakan agunan, meskipun kita sudah ada regulasi 100 juta ke bawah tanpa agunan, tetap praktiknya harus pakai agunan.

Nah, lalu kita sedang usulkan, *kan* pakai *innovative credit scoring*, supaya, karena kalau masih mengandalkan bank, harus mengandalkan tadi, histori kredit. Nah, ada 30,76 juta UMKM yang belum terhubung ke bank yang *enggak* ada histori kreditnya, sehingga kita ingin dorong penggunaan *innovative scoring*, *innovative credit scoring* yang sebenarnya sudah diterapkan di 145 negara, jadi ini tinggal didoronglah.

Saya kira Kementerian Keuangan, OJK, sama Menko Ekonomi, untuk ada *mandatory* untuk penggunaan *innovative credit scoring* untuk program KUR ya, KUR. Karena KUR *kan* program pemerintah, jadi si bank penyalur KUR ini diwajibkan pakai *innovative credit scoring* ya. Kalau *enggak*, ya, *enggak* akan menjangkau yang *unbankable* tadi ya, karena belum punya histori kredit. Kalau *pake*, *nggak* punya agunan, *enggak* punya histori kredit. Tapi kalau pakai *innovative credit scoring*, dalam uji coba kami itu bisa ada sekitar berapa, 74% UMKM yang *unbankable* sebenarnya layak menerima KUR, *gitu* ya. Jadi ini, ini kedua.

Kami juga sedang mendorong alternatif pembiayaan lain. Misalnya UMKM yang menjadi vendor pengadaan pemerintah, *kan* sekarang 40% APBN, itu *kan* untuk produk lokal, salah satunya UMKM, belanja pemerintah. Nah, tapi UMKM *kan* terkendala pembiayaan modal kerja ya. Nah, kita sudah coba gandeng asosiasi perusahaan *crowd funding*, *security crowd funding* ya, SCF. Mereka bisa membiayai sampai 50 miliar, kalau ada UMKM yang sudah mendapatkan order dari pemerintah atau BUMN. Nah, tapi *kan* OJK-nya hanya membatasi hanya 10 miliar, SCF tadi. Kami sedang *lobby* OJK supaya dilonggarkan bisa sampai 50 miliar, ya. Nah, ini akan memberi kesempatan UMKM untuk menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah yang cukup besar ya, 400 triliun, ya, kalau sekarang kira-kira begitu.

Kami juga kerja sama dengan SCF untuk mendorong UMKM naik kelas lewat pencarian pembiayaan lewat pasar modal ya, IPO. Nah, kita *kan* sudah ada papan akselerasi dengan bursa, UMKM yang punya aset 50 miliar, itu boleh IPO, sehingga bisa mencari sumber pembiayaan yang lebih murah, *kan* begitu. Nah, hari ini masih 44, dari sejak 2021. Kalau dibandingkan dengan korporasi, 800, ya.

Nah, kami melihat ini satu kesempatan UMKM untuk naik kelas, ya, dengan pembiayaan alternatif di luar perbankan, yaitu pasar modal. *Kan* kalau pasar modal ini, kelebihan daripada bank itu *kan*, kalau bank ya bulan pinjamannya harus terus nyicil, usahanya rugi atau *enggak*. *Tapi* kalau di pasar modal *kan* kalau rugi, ya *enggak* dibagi *devidennya*, jadi ada kesempatan untuk tumbuh.

Nah, rata-rata UMKM untuk dapat yang 55 miliar itu asetnya sedikit, tapi kalau yang 30, 20 itu banyak, sehingga kami sekarang punya dua ide. Satu, dorong SCF-nya tidak hanya 10 miliar, tapi bisa tadi sampai 20-30 miliar, begitu. Termasuk kita juga sedang mengupayakan untuk membangun *holding* UMKM yang 10 miliar, 10 miliar, dari perusahaan sejenis, mereka kemudian bisa mencari pembiayaan di ini.

Nah, kami juga mengembangkan pembiayaan lain, gandeng *Venture Capital* untuk membiayai *startup* yang kami inkubasi, dan ini saya kira juga bisa jadi alternatif. Nah, yang diperlukan *kan* saya kira soal asuransinya *lah*, ya. Itu supaya mereka menjadi lebih berani.

Nah, tadi mumpung, saya kira yang lain, saya mungkin saya akan jawab secara tertulis. Tadi seperti *blueprint* korporatisasi petani, termasuk juga tadi soal data, ya. Kenapa?

Ya nanti yang koperasi bermasalah, itu *kan* karena ini sudah di wilayah hukum, asetnya ditahan polisi, Pak, ya. Jadi, *enggak* bisa dilelang. Ya, nanti kita akan sampaikan detail progresnya. Yang tadi minyak makan merah, juga ini bagian dari transformasi koperasi. Ini saya ingin sampaikan, yang *piloting* sudah dibangun di Deli Serdang, itu saya kira sudah diresmikan ya. Lalu, juga sedang dalam proses pembangunan di Palalawan ya, Riau, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Lalu, juga *udah* progresnya sudah 60%. Lalu akan segera *groundbreaking* di Sanggau, itu Koperabu, lalu, di Sekadau, Koperasi Agro Keling, Keling Kumang, lalu, di Tanah Laut, Koperasi Sawit Makmur, lalu, Pangkalan Bun, Koperasi Tani Subur, dan Tiku Lima Jorong.

Nah, ini memang ada kaitan dengan Pak Mendag, *nih* ya. Kami *kan* bisa memproduksi dengan harga sawit hari ini, harga CPO ini sekitar harga 14.000, ya? 14.000, tanpa subsidi, Pak. Nah, kalau di subsidi nanti dari Pak Mendag 6.000 seperti Minyak Kita, kita bisa, koperasi bisa jual dengan harga 8.000, ya begitu. Nah, sehingga kita bisa sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, tapi juga bisa menyediakan minyak sehat, murah, untuk masyarakat.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Minyak merahnya lebih gurih.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Minyak merah gurih, Pak, walaupun *enggak*, *enggak* biru, Pak. Karena Pak Erlangga bilang, "Pak Teten, minyak goreng itu biasanya kuning".

Jadi ini sebenarnya bagus, Pak, ya, karena datanya 40,5% lahan sawit mandiri itu milik petani. Jadi, kalau ini diprogramkan untuk dibikin koperasi, lalu bikin minyak makan merah, ini punya signifikansi untuk kesejahteraan petani, termasuk suplai minyak sehat kepada masyarakat.

Saya kira mungkin itu, ya. Yang lainnya mungkin nanti kita akan sampaikan. Kalau Dekopin memang alokasinya kecil, Bu. Kita hanya alokasikan 3 miliar, Dekopinnya ada dua. Jadi, itu untuk biaya, *kayaknya* untuk biaya *overhead* kantor *aja* mereka *lah*. Mereka akan minta, biasanya kalau ada *meeting-meeting aja*, Bu.

Ya, dalam ke depan, seperti di RUU koperasi, berdasarkan fakta, memang ini *kan penunggalan-penunggalan* organisasi ini *kan juga enggak* efektif *kan*. Faktanya *kan juga* jadi banyak, *gitu*. Dekopin juga sejak dulu, bukan sejak kita *aja*, lebih dari satu, ya ormas-ormas lain juga lebih duluan, ya *kan*? *Nah*, kami

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Kembar, pengurus kembar.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Pengurus kembar.

Jadi, memang sudah enggak relevan sebenarnya. Cuma kalau kami ingin, berdasarkan pengalaman di luar, termasuk juga realitas di Indonesia, penataan kelembagaan koperasi itu kita ingin nanti berbasis sektoral, berbasis industri. Jadi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi pertanian, nanti seperti itu.

Nanti, nah, Dekopin itu bentuknya semacam konfederasi, ya. Konfederasi dari asosiasi-asosiasi ini, sehingga di dalam Dekopin itu nanti jelas, yang duduk di Dekopin itu adalah representasi dari asosiasi koperasi, bukan yang macam yang lain-lain, ya. Sekarang *kan* banyak juga yang bukan orang koperasi duduk di Dekopin, *kan*? *gitu*. Nah, ya, jadi itu saya kira bagus. Jadi, kita tidak menolak Dekopin, tapi ya kita *new* Dekopin, *lah*, ya. Ya, itu.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi maksudnya itu yang akan dirumuskan di dalam

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

RUU Koperasi.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

RUU.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Koperasi.



KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Karena tadi waktu Bu Ema bilang itu salah satu penyebab berhentinya, sebenarnya bukan, memang utamanya penyebab berhentinya RUU waktu itu, ya, itu, *gitu kan*.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Iya.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dan, apa namanya

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Iya, makanya, tapi *kan* maksud saya, sebenarnya kita tidak menghilangkan Dekopin, tapi kita

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Merestruktur.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Merestrukturisasi Dekopin itu supaya jauh lebih fungsional, lebih efektif mewakili kepentingan koperasi, begitu.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dan kalau mungkin kita mau kasih tambahan masukan, kalau memang mau dikejar, diselesaikan ini undang-undang, mungkin salah satu yang harus *diselipin kan* kita semua tahu, bahwa penanganan daripada UMKM ini *kan* tersebar di 22 kementerian dan lembaga. Nah, mungkin Kementerian Koperasi itu harus menjadi semacam Bappenasnya, *gitu, kan*, supaya bisa menjangkau dan mengetahui mana-mana UMKM yang sudah tersentuh oleh program dari mana-mana lembaga tadi, *gitu, kan*.

Dan itu harus ada koreografernya, yang itu yang kita harapkan adalah Kemenkop, *gitu, kan*, supaya ada satu yang bertanggungjawablah. Kalau *enggak*, ini program-program berjalan sendiri-sendiri, masing-masing, ada yang *overlap* dan seterusnya, mungkin akhirnya *enggak* optimal, *gitu, kan*. Nah, mungkin itu pemikiran yang tadinya juga kita sebetulnya mau sampaikan, kalau itu, apa, undang-undang sampai ke Komisi VI, *gitu, kan*.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Baik, itu mungkin saya jawab sekali, itu. Itu saya kira bagus, Pak Ketua, yang itu, Pak Muslim, yang solusi nelayan, itu memang kami tidak punya anggaran. Kami ini *kan* dengan anggaran kecil, *kan* harus mengembangkan kreativitas, Pak. Jadi, kami gandeng BUMN, ya, lalu dengan Pertamina. Jadi, itu sebenarnya kami mengembangkan sistem, ya, penyaluran solar subsidi untuk nelayan, karena nelayan ini *kan* 60% biaya produksinya itu untuk bahan bakar. Sehingga, waktu itu saya dipanggil oleh Pak Presiden, kalau dinaikkan bahan bakar ini pasti ramai itu adalah nelayan, termasuk juga tadi nilai tukar nelayan akan turun.

Nah, kami tawarkan solusi, akhirnya dikerjakan sama Pak Erick. Jadi, rencananya *tuh* kami, *kan* nelayan, kita ini beli sebagian besar solar itu dari pengecer, Pak, ya, harganya dua kali lipat dari harga di SPBU. Nah, ada 11.000 desa nelayan, tapi SPBN-nya hanya 399. Nah, karena itu waktu itu kami tawarkan bikin SPBU-SPBU mini yang harganya cuma 250 juta di tiap desa, *gitu*. Nah, kami hanya bikin *piloting*.

Ya? Untuk subsidi, solarnya kuotanya dari Pertamina. Kami bikin konsep, jadi nanti tidak akan diselundupkan, Pak, seperti dulu, karena kita *udah* pakai data digital, *by name, by address, by volume* tiap orang. Lalu, My Pertamina dicocok itu, jadi *klop*. Jadi, *enggak* akan ada, si nelayannya juga merasa aman bahwa kalau dipakai 10 liter sehari, mereka dalam sebulan mereka tetap punya stok di kuotanya di situ. Nah, ini yang kita akan kembangkan, Pak.

Nah, jadi rencananya waktu itu, BRI yang akan membiayai pembangunan ininya, tapi akhirnya *enggak* jalan, akhirnya koperasi. Nah, nanti salah satunya *kan* sudah, Pak, yang di Aceh, *kan* kita coba dan bagus. Nah, ini yang kita mungkin kita akan kebut lagi, Pak.

Saya sudah janji ketemu dengan Pak Wamen BUMN untuk mengimplementasikan ini secara besar, karena dalam waktu dekat *kan* memang harus ada, ada penyesuaian harga solar yang bisa dua kali lipat. Kalau *enggak*, itu pasti harga di, harga di nelayan, kalau beli dari pengecer, itu pasti bisa sampai 20.000, Pak. Itu pasti memberatkan. Ini saya sudah angkat ,supaya harus segera solusi nelayan ini diperluas, Pak, di desa-desa nelayan.

Nah, karena dengan SPBU ini lebih sederhana izin ininya, apa, izin pembangunannya, karena apa? Tidak harus AMDAL yang serius seperti itu, karena ini hanya di, tanpa AMDAL, *kan*? Tanpa AMDAL dan mendekati ke desa-desa. Jadi, kita bisa bangun yang harga 250 juta di setiap desa, dengan kuota ininya, jadi aman. Jadi, aman tanpa penyelundupan, itu yang, jadi ini konsep kami yang kami tawarkan kepada Menteri BUMN dan ini.

Mungkin itu, terima kasih. Selebihnya nanti mungkin kita akan jawab dengan secara tertulis.

Terima kasih.



KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.

Walaikumsalam,

Silakan, Pak Zulkifli Hasan.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Mudah-mudahan 5 menit, Pak. Lainnya nanti tertulis.

Pertama, tadi soal keramik dan, apa, *micin*. Saya sependapat, nanti kita pelajari, kita bahas di Kemendag. Tapi saya ini *kan*, *anu*, Pak, termasuk sama Pak Teten ini kami sama. Kami ini *enggak* suka sebetulnya, kalau impor-impor banyak itu *enggak* suka, *gitu*. Cuman kita ini *kan* perdagangan bebas, seluruhnya kita atur, kita tata. Tapi prinsip dasarnya, kita ini sama, Pak. Kita perlindungan, keberpihakan terhadap UMKM, industri lokal itu sebetulnya *enggak* tawar-tawar, ya. Oleh karena itu, keramik itu kami sudah sepakat. Kita kasih bea masuk anti-*dumping*, kita kasih lagi bea masuk tindakan pengamanan. Lawannya banyak, Pak. Tapi saya kan sudah biasalah, *enggak* takut lagi, *gitu*, *udah* biasa. Ya, kadang-kadang, ya, tahulah lobinya *kan* kuat, ya, tapi saya jalan terus.

Nah, kedua, kami juga sepakat, nanti ditata, Pak. Semua tidak di Priok saja, *gitu*. Kita ini kan punya pelabuhan banyak, *gitu*. Kami sudah hampir sepakat, *tuh*. Pak Teten, semua, kami sudah hampir satu *anu*, kita, Pak, ya. Jadi, itu soal keramik dan sama *micin* tadi, ya. Tentu memang kita harus tata. Dan itulah, Pak, yang saya lakukan pertama, mengenai pengendalian, kendalikan, impor kendalikan.

Satu lagi, pertanyaan tadi mengenai *pass border* jadi *border*, dua itu sudah saya *kerjain*. Waktu saya jadi menteri, satu *pass border* jadi *border*, sudah. Maka, lahir dulu PP Permendag 36, *gitu*, ya. Pertek-pertek banyak, itu sebetulnya tujuannya mengendalikan, menata, *gitu*, ya.

Tapi ya begitulah, *anu*, apa, kita ini, saya lagi di mana? Lagi di Peru, yang rapat *tuh*, Pak, Menteri Perindustrian, inisiasi Pak Menko, dan Menteri Keuangan. Permendag saya *tuh* *dirubah* jadi Permendag 8, *gitu*, ya, *nah*, itulah kita. Tapi semangatnya ini sama kita. Tentu kita cari jalan lain, ya. Tadi ada dimasukkan bea anti-*dumping*, ada bea masuk tindakan pengamanan, ada pelabuhan-pelabuhan yang nanti kita tata. Itu untuk pengendalian impor.

Kedua, stabilisasi, Pak. Saya ini sering dihujat di, apa lagi kalau *netizen*, karena selalu saya yang khawatir itu. Harga naik, itu, Pak, itu juga *enggak* bagus memang karena konsumen berat, tetapi produsennya pasti senang, *gitu*. Tapi kalau harga murah, Pak, tadi *tuh*, pasti petaninya karam, UMKM-nya karam. Makanya selalu saya mengatakan, kalau ditanya

wartawan, jangan terlalu murah. Selalu saya bilang, “Jangan terlalu murah, karena kalau terlalu murah itu risikonya petani, produsennya tutup”, ya, *kan*.

Oleh karena itu fungsi pemerintah itu stabilisasi, maka ada harga patokan, *gitu*. Kalau harga tinggi, kita bisa kendalikan, mudah-mudahan, mungkin sebulan, 2 minggu. Tapi kalau deflasinya tinggi sekali harga terlalu murah, itu risikonya panjang, tutup *anunya*. Nah, ini tugas kita, sekali lagi, kita stabilisasi, kita kendalikan, ya. Dua itu, saya kira yang paling penting, stabilisasi harga dan pengendalian impor. Yang ketiga, tadi mengenai keramik dan *micin*.

Yang keempat, ada, apa, Bapak tadi Aceh, pasar, itu dibatalkan, Pak, suratnya, bukan kita *nunda*, Pak, ya. Dibatalkan, ya? Mereka yang mengundurkan diri, mungkin tanahnya *enggak* siap atau apa.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Tambah sedikit, Pak, Pak Menteri. Jadi, sebenarnya itu waktu itu *kan* diminta pindah lokasi.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Oh, iya.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Jadi, setelah pindah lokasi, habis itu anggaran dari kementerian itu sudah beda lagi.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Waktu itu sudah *oke*.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Iya.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Disetujui, bupati kirim surat. Ya, mungkin karena itu, yang ini dibatalkan. Pindah mungkin, ya.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

(tidak menggunakan mic)

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Oh iya, ya. Ya, berarti baru lagi, Pak, hitungannya baru lagi.

Saya kira demikian, Pak.

Terus anggaran, kami sudah disetujui oleh Komisi VI, penambahan 500 miliar itu. Oleh karena itu, kita berusaha, dapat *enggak* dapat, ya, namanya *ikhtiar*, Pak, 500, saya sudah bikin surat ke Presiden. Ini nanti coba akan *ngomong* ke Banggar, ya, *gitu*.

Saya kira itu. Dan nasib kita nanti, Banggar-Banggar ini, *anu*, Pak, sama Pak Hekal nanti, yang akan datang.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Pak Hekal *lah*.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Ini *ngatur-ngatur* kita nanti Pak Hekal ini, Pak. Jadi, mesti baik-baik sama Beliau ini.

Terima kasih.

Selamat sore,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Ampun, ampun, Pak. Ini, baru sekali *nih* Gerindra menang, *gitu kan*.

Baik kita ke draf kesimpulan.

Itu *nunggu* 2029, Pak.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Perdagangan RI terkait Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025, Pagu Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, Rabu, 4 September 2024.

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri Koperasi dan UKM RI terkait realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI yang sampai 2 September 2024 mencapai 51,14% dan mendorong Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk meningkatkan realisasi anggaran Tahun 2024 agar tercapai target-target yang telah ditetapkan.

Setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri Perdagangan RI terkait realisasi anggaran Kementerian Perdagangan RI yang sampai 31 Agustus 2024 mencapai 57,34% dan mendorong Kementerian Perdagangan RI untuk meningkatkan realisasi anggaran Tahun 2024 agar tercapai target-target yang telah ditetapkan.

Sama aja.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Menteri Koperasi dan UKM RI serta Menteri Perdagangan RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.02/2024 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.480/D.8/PP.04.03/07/2024, di mana ditetapkan Pagu Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Kementerian Koperasi dan UKM RI yang ditetapkan sebesar Rp937.166.229.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp388.237.258.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
2. Program Kewirausahaan UMKM dan Koperasi sebesar Rp548.928.971.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*)

- b. Kementerian Perdagangan RI yang ditetapkan sebesar Rp1.653.277.516.000,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.372.094.934.000,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*)
2. Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp127.702.906.000,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah*)
3. Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp153.479.676.000,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Miliar*

Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh puluh Enam Ribu Rupiah)

Apakah angka-angkanya sudah benar ini? Sudah, ya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp500.000.000.000,00 (*Lima Ratus Miliar Rupiah*) yang akan digunakan antara lain untuk:
 - a. Penguatan Perwakilan Perdagangan untuk Pemasaran Produk Indonesia dan *Market Intelligence*,
 - b. Promosi Peningkatan Ekspor,
 - c. Integrasi Informasi Ekspor,
 - d. Penguatan Kebijakan Peningkatan Ekspor.

Benar ya, Pak? *Oke*. Ini di Kementerian Koperasi memang *gak* mengajukan tambahan, ya?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Rapat lalu kita mengajukan sekitar 600. Lebih besar dari Pak Mendag, Pak.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Masih mau.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

665 Miliar

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Masih mau tetap kita upayakan, *kan?*

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Iya, Pak.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalau *gitu tambahin* satu poin lagi ini.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Tadi lupa saya menyampaikan.



MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Harus. Namanya ikhtiar, Pak.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Keluar 10% saja lumayan, *gitu kan*.

Coba *tambahin*, yang limanya ini. Yang limanya, disamakan dengan ini yang, apa, yang lalu.

Saya pikir sudah *nyerah* itu.

SEKRETARIS MENTERI KOPERASI DAN UKM (Ir. ARIF RAHMAN HAKIM, M.Si):

Komisi.

Saya bacakan, izin, Pak.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya ,coba dibacakan, Pak.

SEKRETARIS MENTERI KOPERASI DAN UKM (Ir. ARIF RAHMAN HAKIM, M.Si):

Komisi VI DPR RI menyetujui usulan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait tambahan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp665.028.702.000,00.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ini *kan* kita sudah *setujui* di masa sidang kemarin *nih*, jadi kita.

SEKRETARIS MENTERI KOPERASI DAN UKM (Ir. ARIF RAHMAN HAKIM,M.Si):

(Enam Ratus Enam Puluh Lima Miliar Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah)

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ini perlu, Pak.

SEKRETARIS MENTERI KOPERASI DAN UKM (Ir. ARIF RAHMAN HAKIM,M.Si):

“Yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas dan nonprioritas,”.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sebentar-sebentar, Pak, sebentar, Pak, dia *ngikutin ngetiknya nih*.

SEKRETARIS MENTERI KOPERASI DAN UKM (Ir. ARIF RAHMAN HAKIM,M.Si):

“Yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas dan nonprioritas yang belum”,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sebentar, Pak, “Yang akan digunakan untuk”. Itu “antara lain”nya buang *aja*.

SEKRETARIS MENTERI KOPERASI DAN UKM (Ir. ARIF RAHMAN HAKIM,M.Si):

“Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas dan nonprioritas”.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Memenuhi, bukan *memehuni*.

SEKRETARIS MENTERI KOPERASI DAN UKM (Ir. ARIF RAHMAN HAKIM,M.Si):

“...Dan non-prioritas yang belum *terakomodir* pada pagu indikatif. Yang belum *terakomodir* pada Pagu Anggaran Tahun 2025”.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

Jadi, nomor limanya sekarang menjadi.

5. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp665.028.702.000,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Miliar Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah*) yang

akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas dan non-prioritas yang belum *terakomodir* pada Pagu Anggaran Tahun 2025.

Benar, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor enam. Oh, ini yang tadi mengenai keramik. Kita perlu tunggu Pak Menteri atau bisa diwakilkan Pak Wamen? Kita tunggu Pak Menteri. *Oke.*

6. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan RI untuk merumuskan regulasi terhadap pengendalian volume dan pelabuhan pintu masuk impor keramik.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Setuju.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk mengatur regulasi dan peraturan terkait volume ekspor tetes,

Itu *gak* perlu ditulis Lartas lah, itu mekanismenya pemerintah.

Dan volume importasi MNG (Mononatrium Glutamat).

Setuju, Pak Menteri?

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C). ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Setuju.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk meningkatkan koordinasi terkait pendataan, pembiayaan, dan pengembangan UMKM guna meningkatkan produktivitas dan nilai jual produk-produk UMKM.

Sebetulnya ini nanti sebagian yang Bapak sampaikan tadi ini *kan* kalau memang ini, kita bisa coba *uber* di dalam undang-undang itu. Tapi kalau *enggak* ya untuk *support* dukungan terhadap program-program yang tadi Bapak sampaikan.

Setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor sembilan. Ini normatif saja.

9. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk, eh serta Kementerian Perdagangan RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

(RAPAT: SETUJU)

Oke, terima kasih.

Dengan ini, telah selesailah kita pada rapat hari ini.

Atas nama Pimpinan Komisi VI, oh masih ada yang mau bicara? Silakan, Bu.

F-PKB (SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.A.P.):

... (*suara tidak jelas*) posisi kementerian yang di kelas III ya, kementerian kelas III. Terus kemudian tadi Pak Hekal juga menyampaikan tentang bagaimana sebuah kementerian kelas III yang harus mengorkestrasi sebegitu banyak UMKM dan sebagainya. Nah, misalnya kenapa tidak misal masuk dalam semacam kesimpulan, bagian dari yang kita usulkan untuk naik kelas untuk kementerian, *gitu loh*.

Artinya, kalau saya lebih pada sisi kemanfaatan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ini *kan* kita berkaitan sekali dengan hajat hidup masyarakat yang luas, katakanlah tadi sekitar 60 juta UMKM yang ada, *gitu kan*. Nah, tapi kemudian bagaimana kita akan mengorkestrasi kalau kemudian yang diberi orkestrasi juga punya wewenang lebih kecil, sementara juga harus berkomunikasi dengan banyak kementerian, lembaga, dan lain sebagainya.

Nah, artinya mungkin *gak* kita misalnya memberikan usulan atau memasukkan dalam kesimpulan, berkaitan dengan posisi kementerian yang saya yakin bisa menjadi bagian dari usulan atau rekomendasi kita dari Komisi. Tentunya dengan kesepakatan dari kementerian, jika kementerian juga berkenan untuk kita usulkan menjadi lebih punya kekuatan yang lebih, ya naik kelas *lah*, seperti itu, Pak.

Itu saja *sih*.



MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Apa, merespons Ibu Siti Mukaromah. Saya kira memang argumennya ada, Pak. Jadi, harus ada perubahan susunan kabinet. Karena waktu itu Pak, sudah dibahas juga waktu itu dengan Pak Suharso, Pak Menko, Ibu Menteri Keuangan. Memang sebaiknya *dinaikin* jadi kelas II *lah*, Pak, kalau misalnya mau mengkonsolidasi anggaran yang menyebar kira-kira enam, tujuh triliun *kan* ada, Pak. Tapi *kan* kalau kementeriannya kecil *tuh*, berat *tuh* penyerapannya.

Nah, argumen hukumnya ada, karena di dalam Susduk Kementerian itu *kan*, yang diprioritaskan itu yang dibunyikan di dalam konstitusi, Pak. Nah, koperasi itu ada di dalam undang-undang dasar, *gitu*. Jadi, argumennya ada, jadi ini sebenarnya bagus juga kalau pemerintah yang akan datang sekaligus menaikkan ini, Pak, *mumpung* Pak Hekal yang akan memimpin.

Itu, Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Yang akan memimpin, Pak Prabowo, Pak. Jadi, tapi itu boleh saja, kita tentu kalau mitra Komisi VI, kita *kepengen* tingkatkan juga perannya dan memang rasanya perlu. Nah, *cuman* kalimatnya seperti apa itu bunyinya? Karena kita di sini *kan* menitip pesan ini justru malah balik ke pemerintah untuk Bapak laporkan kepada Presiden. Dan tentu kita dengan cara kita masing-masing, akan menyampaikan kepada pimpinan kami di partai masing-masing, *gitu kan*. Tapi kalau itu mau kita bunyikan, persis kalimatnya itu, boleh, silakan dirumuskan.

Naikin lagi kesimpulan. Ini biasanya kerja Pak Sekjen ini. Coba, tentu yang paling paham tentang kelembagaannya *kan* Pak Sekjen ini. Jadi, nomor 9-nya kita tarik lagi,

(RAPAT: SETUJU)

Kita jadikan nomor 10, nomor 9-nya ini.

SEKRETARIS MENTERI KOPERASI DAN UKM (Ir.ARIF RAHMAN HAKIM, M.Si):

Komisi VI DPR RI.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mendukung.

SEKRETARIS MENTERI KOPERASI DAN UKM (Ir.ARIF RAHMAN HAKIM, M.Si):

Mendukung penguatan kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM dari Kementerian tipe 3 menjadi tipe 2 atau tingkat 3 ke tingkat 2.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kelembagaan, ini langsung tulis *nih*, "Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian, Kelembagaan, Kementerian Koperasi dan UKM RI dari kementerian, eh untuk ditingkatkan dari kementerian"

SEKRETARIS MENTERI KOPERASI DAN UKM (Ir.ARIF RAHMAN HAKIM,M.Si):

Kelompok mungkin, kelompok 3 menjadi kelompok, kementerian kelompok 2.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kementerian kelompok 3 menjadi kementerian kelompok 2, begitu ya, Pak?

SEKRETARIS MENTERI KOPERASI DAN UKM (Ir. ARIF RAHMAN HAKIM,M.Si):

Iya.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke. Setuju ya semua?

(RAPAT: SETUJU)

Oke. Kalau begitu sudah selesai.

Sebelum kita tutup, apakah ingin disampaikan kata penutup mungkin dari yang senior, Pak Zulkifli Hasan. *Monggo*, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (Drs. TETEN MASDUKI):

Pak Mendag saja.

MENTERI PERDAGANGAN RI (DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.):

Kita masih ada rapat lagi *enggak*, Pak, ya? Masih? Sekali lagi *lah*. Kalau *gitu* jangan perpisahan dulu, Pak.



Baik.

**Pak Ketua, dan
Teman-teman Komisi VI yang terhormat,**

Terima kasih atas dukungan kerja sama kita selama ini, *toh* masih ada satu kali lagi rapat, ya. Saya memang *enggak* panjang, kalau Pak Teten *kan* 10 tahun, saya 2 tahun ya, Pak, ya? Dua tahun, tapi banyak sekali dukungan kawan-kawan. Tanpa dukungan teman-teman, tentu tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Tapi tadi Pak Demer itu pulang *sih*, ya? Iya, itu saya kalau *nyalon* lima kali juga, Pak, di sini. Maka *udah enggak nyalon* lagi kemarin. Itu teman saya pertama dulu, tahun 2004 dia *tuh*, apa, jadi DPR-nya.

Terima kasih, Pak Ketua dan teman-teman semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A/WAKIL KETUA KOMISI VI
DPR RI):**

Jadi, saya koreksi sedikit sebenarnya, kalau tidak ada perubahan lagi di anggaran Bapak-bapak, ternyata sesuai dengan yang akhir itu, mungkin tidak ada rapat lagi. Tapi kalau ada rapat lagi, berarti ada mudah-mudahan kabar gembira, begitu *kan*?

Baik. Baik, atas nama Pimpinan Komisi VI saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi VI yang hadir pada hari ini dan tentunya kepada mitra kita, Menteri Perdagangan RI dan Wakil Menteri Perdagangan RI, Menteri Koperasi dan UKM RI beserta seluruh jajarannya, terima kasih.

Dengan ini rapat kami tutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.08 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

AJI NURHADI WIBOWO, S.E., M.A.P
NIP. 198003232005021003

